



Abdul Malik adalah Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang ilmu Geografi. Lahir di Makassar 11 Oktober 1977. Menyelesaikan program Sarjana dari Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar tahun 2001. Magister Sains dari Program Studi Lingkungan Hidup dengan konsentrasi Pengelolaan Lingkungan Laut Dangkal dan Pantai UNHAS Makassar tahun 2005. Gelar Ph.D. diperoleh dari Department of Geosciences and Natural Resource Management, Section Geography, University of Copenhagen, Denmark tahun 2016. Aktif sebagai dosen tetap dan peneliti pada Jurusan Geografi FMIPA Universitas Negeri Makassar (UNM) sejak 2006 – sekarang dan mengajar di Program Magister Pendidikan Geografi Pascasarjana UNM sejak 2016-Sekarang. Saat ini menjabat Kepala Unit Workshop Geospasial Jurusan Geografi. Dalam lima tahun terakhir penulis aktif melakukan penelitian dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, lingkungan, remote sensing untuk ekosistem pesisir, biodiversity, layanan dan nilai ekonomi ekosistem pesisir, dan ekowisata. Beberapa artikel ilmiah yang ditulis telah terpublikasi di jurnal internasional terindeks dan bereputasi (Q1, Q2 dan Q3) pada publisher Springer, Elsevier, MDPI dan TSHE. Penulis juga menjadi Peer-reviewer dan editorial board untuk beberapa jurnal nasional maupun internasional sejak tahun 2016 hingga sekarang.



Abd. Rahim adalah Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian. Lahir di Makassar 12 Desember 1973. Menyelesaikan Program Diploma Agribisnis FP-UNHAS Makassar (1997). Gelar Sarjana Pertanian (S.P.) dari Jurusan Sosek Pertanian FP-UNHAS Makassar (2000). Magister Sains (M.Si.) Program Studi Magister Manajemen Agribisnis FP-UGM Yogyakarta (2003). Doktor (Dr.) Program Studi Ekonomika Pertanian FP-UGM (2010) dengan predikat "Cumlaude". Aktif sebagai dosen tetap dan peneliti pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi FE-UNM Makassar (2005-2009), selanjutnya berdasarkan kompetensinya pindah ke Program Studi Ekonomi Pembangunan konsentrasi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis FE-UNM Makassar (2010-sekarang). Dosen Luar Biasa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UNM (2011-Sekarang). Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FE-UNM Makassar (2012-2016) dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan FE UNM (2017-2021). Selain mengajar penulis aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi pertanian, ekonomi rumah tangga nelayan, ekonometrika dan ekonomi lingkungan. Beberapa Buku Ajar dan Referensi ilmiah ber-ISBN serta artikel ilmiah nasional dan internasional telah di terbitkan sejak tahun 2005 hingga saat ini, dan menjadi Peer reviewer pada beberapa jurnal nasional dan internasional.



Uca Sideng, lahir di Buntu Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 4 April 1971. Menyelesaikan studi di Jurusan Geografi Fisik Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada tahun 1996 dengan gelar Sarjana Sains (S.Si.). Pada tahun 1998 sampai sekarang bekerja sebagai dosen di Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar. Tahun 1999 melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dan mendapat gelar Magister Pertanian (M.P.) pada tahun 2002. Tahun 2009 melanjutkan studi doktor di Department Geografi Universitas Kebangsaan Malaysia dan mendapat gelar Ph.D. pada tahun 2014. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Geografi FMIPA Universitas Negeri Makassar. Penulis juga mengajar di Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Geografi. Di samping mengajar, penulis juga melakukan penelitian bidang lingkungan, pertanian dan mitigasi, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

UPT Badan Penerbit UNM
 Alamat: Gedung Perpustakaan Lt.1 Kampus Gunung Sari Baru
 Jl. Raya Pendidikan 90222 Telepon: (0411) 865677 / Fax: (0411) 861377
 Email: badanpenerbitunm@gmail.com



Abdul Malik | Abd. Rahim | Uca Sideng

PARIWISATA & PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE

Badan Penerbit UNM

PARIWISATA & PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE

Abdul Malik | Abd. Rahim | Uca Sideng

Badan Penerbit UNM

Pariwisata dan Pengembangan Ekowisata Mangrove

Abdul Malik

Abd. Rahim

Uca Sideng

**PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN
EKOWISATA MANGROVE**

Hak Cipta @2019 oleh

Abdul Malik, Abd. Rahim, dan Uca Sideng

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan pertama, 2019

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

Gedung Perpustakaan Lt. 1 Kampus UNM Gunungsari

Jl. Raya Pendidikan 90222

Tlp. /Fax. (0411) 865677 / (0411) 861377

Email. badanpenerbitunm@gmail.com

ANGGOTA IKAPI No. 011/SSL/2010

ANGGOTA APPTI No.006.063.1.10.2018

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

Makassar 2019

iv, 147 hlm; 23 cm

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulisan buku berjudul "Pariwisata dan Pengembangan Ekowisata Mangrove" dapat diselesaikan.

Di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sektor pariwisata menjadi salah satu penopang pembangunan negara. Dalam perkembangannya pariwisata terus mengalami perubahan dan mengarah ke bentuk dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (ekowisata) yang berlandaskan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal.

Keunggulan buku ini terletak pada kajian pariwisata yang diulas secara mendasar dan kajian pengembangan ekowisata mangrove yang sebelumnya masih jarang dipublikasikan. Untuk itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta referensi bagi orang-orang tertarik pada kajian pariwisata, geografi dan lingkungan, dan pengembangan wilayah, serta mereka yang terlibat dan berkecimpung dalam dunia pariwisata dan lingkungan.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritikan-kritikan dan saran-saran dari para pembaca yang bersifat membangun guna penyempurnaannya ke depan senantiasa ditunggu. Penulis juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih sehingga buku ini dapat terwujud, terutama kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pendanaan melalui proyek penelitian pada skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) 2018-2019 yang mana buku ini menjadi salah satu luaran yang dihasilkan.

Makassar, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Fokus Isi Buku ini	2
B. Struktur Isi Buku ini.....	2
BAB II. DASAR DAN KONSEP PARIWISATA	5
A. Pariwisata Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu.....	5
B. Wisatawan	7
C. Bentuk dan Jenis Pariwisata.....	8
D. Destinasi dan Atraksi Wisata	22
E. Sistem Daerah Tujuan Wisata (DTW)	23
BAB III. INDUSTRI PARIWISATA: JENIS USAHA DAN PERLENGKAPAN.....	25
A. Jenis Usaha dalam Industri Pariwisata	26
B. Perlengkapan dalam Industri Pariwisata	30
BAB IV. PERWILAYAHAN DAERAH TUJUAN WISATA DI INDONESIA	41
BAB V. PERENCANAAN PARIWISATA.....	49
A. Pengertian dan Manfaat Perencanaan Wisata	49
B. Aspek-Aspek Perencanaan Wisata.....	50
C. Perencana Wisata.....	51
D. Tahapan dalam Perencanaan Wisata	52
E. Instrumen Observasi Atraksi dan Fasilitas Wisata.....	55
BAB VI. EKOWISATA.....	59
A. Ekowisata Sebagai bentuk Pariwisata Berkelanjutan.	61
B. Manfaat Pengembangan Ekowisata.....	63
C. Prinsip Pengembangan Ekowisata.....	64

D. Kendala Pengembangan Ekowisata.	65
E. Pengembangan Ekowisata	66
BAB VII. HUTAN MANGROVE DAN PEMANFAATAN SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA	71
A. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove.....	71
B. Sebaran dan Luasan Hutan Mangrove.....	73
C. Keragaman Flora dan Fauna Hutan Mangrove.....	76
D. Degradasi dan Deforestasi Hutan Mangrove	81
E. Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai Kawasan Ekowisata dan Persebarannya.....	84
BAB VIII. KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE.....	87
A. Pendahuluan	87
B. Biofisik Kawasan Ekowisata.....	90
C. Kesesuaian Kawasan Mangrove sebagai Kawasan Ekowisata.....	100
D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	101
E. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat.....	104
F. Persepsi Wisatawan	114
G. Pengembangan Kawasan Ekowisata	119
DAFTAR PUSTAKA	133
INDEKS.....	141
BIOGRAFI PENULIS	145

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu sektor utama yang menunjang pembangunan masyarakat dan negara adalah sektor kepariwisataan. Di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, tak bisa dipungkiri pariwisata menjadi sektor yang diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara.

Dengan berbagai potensi dan jenis pariwisata yang dimiliki dan tersebar di berbagai wilayah propinsi, pariwisata Indonesia memiliki daya tarik tinggi dan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam satu dekade terakhir tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari 6.3 juta pada tahun 2009 menjadi 15.8 juta wisatawan di tahun 2018 dengan pemasukan negara yang juga terus meningkat dari US\$ 6.3 miliar menjadi US\$ 17.6 miliar. Pada tahun 2019 ini, pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta wisatawan dengan target devisa sebesar US\$ 20 miliar.

Pengembangan pariwisata termasuk pariwisata dengan konsep keberlanjutan (ekowisata) perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, apalagi hal ini sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari *old tourism* yang mana wisatawan yang hanya datang melakukan wisata (rekreasi) saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi *new tourism* yang mana wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi.

Hutan mangrove yang banyak tersebar di kawasan pantai Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, panorama/keindahan alam serta memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu kawasan ekowisata di Indonesia.

Untuk itu, sebagai sumbangsih dalam pengembangan dunia pariwisata termasuk pengembangan ekowisata mangrove di Indonesia, buku ini hadir guna memberikan pengetahuan dan penyebarluasan informasi serta referensi terkait hal tersebut.

A. Fokus Isi Buku ini

Buku ini menitikberatkan pada pembahasan tentang pariwisata dan pengembangan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata. Guna pendalaman materi mengenai pengembangan kawasan ekowisata mangrove, buku dilengkapi dengan contoh studi kasus bagaimana merumuskan dan bentuk-bentuk kebijakan strategis yang dapat ditempuh dalam mengembangkan kawasan ekowisata mangrove di kawasan mangrove Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat.

B. Struktur Isi Buku ini

Buku ini terdiri dari delapan bab, dengan fokus pembahasan pada setiap bab sebagai berikut:

1. Bab I, berisi pendahuluan yang membawa pembaca untuk memahami fokus isi dan struktur isi dari buku ini.
2. Bab II, membahas tentang dasar dan konsep pariwisata termasuk di dalamnya mengenai wisatawan, bentuk dan jenis pariwisata, destinasi dan atraksi wisata, dan sistem daerah tujuan wisata (DTW).
3. Bab III, berisi mengenai industri pariwisata termasuk di dalamnya terkait dengan jenis dan usaha dalam industri pariwisata, dan perlengkapan dalam industri pariwisata.
4. Bab IV, membahas perwilayahan daerah tujuan wisata (DTW) di Indonesia termasuk di dalamnya membahas tentang persyaratan yang harus dienuhi sebuah DTW, penggolongan DTW, dan sebaran DTW atau Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Indonesia
5. Bab V, berisi tentang perencanaan wisata termasuk membahas tentang pengertian dan manfaat perencanaan wisata, aspek-aspek perencanaan wisata, perencana wisata, tahapan dalam perencanaan wisata, dan instrumen observasi atraksi dan fasilitas wisata.
6. Bab VI, membahas mengenai ekowisata termasuk di dalamnya membahas tentang dampak ekologi, ekonomi, dan sosial budaya pengembangan pariwisata, ekowisata sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan, peluang dan kendala pengembangan ekowisata, dan pengembangan ekowisata.
7. Bab VII, menguraikan tentang hutan mangrove dan pemanfaatan sebagai kawasan ekowisata termasuk membahas tentang pengertian, fungsi dan manfaat hutan mangrove, sebaran dan luasan hutan mangrove, karagaman flora dan fauna hutan mangrove, degradasi dan deforestasi hutan mangrove, dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata dan persebarannya.

8. Bab VIII sebagai penutup dalam buku ini, membahas pengembangan ekowisata mangrove dengan mengambil contoh studi kasus pada kawasan mangrove di Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat. Bagaimana penilaian terhadap potensi biofisik kawasan mangrove (keanekaragaman flora dan fauna mangrove, pasang surut, dan luasan, sebaran dan ketebalan mangrove), tingkat kesesuaian lahan sebagai kawasan ekowisata, kondisi sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan, dan bagaimana merumuskan dan langkah-langkah strategi yang perlu diambil dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB II

DASAR DAN KONSEP PARIWISATA

A. Pariwisata Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu

Kepariwisataan sebagai ilmu tersendiri pertama kali diajarkan di kota Dubrounik (Yugoslavia) tahun 1920 (Sejak Yugoslavia bubar 1991, menjadi salah satu kota dalam wilayah negara Republik Kroasia). Di kota tersebut pernah didirikan sebuah Lembaga Ilmiah Kepariwisataan, tetapi lembaga tersebut kemudian dibubarkan karena kurang berhubungan dengan dunia luar. Tahun 1930 di Swiss, ilmu kepariwisataan telah diajarkan sebagai mata pelajaran berbagai sekolah tinggi dagang. Dua universitas di Swiss yang banyak mengembangkan kepariwisataan sebagai cabang ilmu pengetahuan yakni Bern University dan St. Gallen University yang dimulai pada tahun 1914. Bern University membentuk Tourist Research Institute untuk menampung segala permasalahan yang terjadi. Pada tahun 1962, dalam kongres yang diadakan di Madrid, Spanyol, setelah memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh *Association D'Experst Scientifiquis Du Tourisme (AIEST)* yang berkedudukan di Bern Swiss, dua organisasi lainnya, yaitu *Alliance Internationale Tourisme (AIT)* dan IUOTO secara resmi mengakui

bahwa Ilmu Kepariwisata sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Di Indonesia istilah pariwisata mulai dikenal pada tahun 1960an yang diperkenalkan oleh budayawan intelektual (Prof. Mr. Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono) atas permintaan Presiden Sukarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI). Mereka mengemukakan istilah pariwisata untuk mengganti istilah *tourism*, atau *travel*, yang konotasinya bisa terkait rasa *pleasure*, *excitement*, *adventure* dan sejenisnya.

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang mana terdiri dari penggalan kata:

Pari	: penuh, lengkap, berkeliling
wis (man)	: rumah, properti, kampung, komunitas
ata	: pergi terus menerus, mengembara (<i>roaming about</i>)

sehingga apabila digabung melahirkan istilah pariwisata, yang berarti “pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) dan berkeliling terus menerus”.

Hakikatnya berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Kepergian ini memiliki banyak kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena hanya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata memiliki kaitan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yakni sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Sehingga dapat disebut bahwa perjalanan wisata merupakan suatu

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Selain itu, dapat pula dikarenakan kepentingan yang terkait dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha atau bisnis lainnya.

B. Wisatawan

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ini biasanya di sebut turis/wisatawan. *United Nation Conference and International Travel and Tourism* mendefinisikan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi suatu negara bukan dimana ia bermukim, bagi setiap keperluan yang bukan untuk mendapatkan penghasilan, di sebut *visitor* (pengunjung). Pengunjung sendiri dibagi atas dua kelompok *traveller* (orang yang melakukan perjalanan), yaitu :

- a. *Tourist* (wisatawan), pengunjung sementara yang tinggal di suatu tempat atau negara lebih dari 24 jam dengan motivasi kunjungan dapat digolongkan untuk liburan (rekreasi, kesehatan studi, agama atau olahraga), bisnis, kesehatan, mengunjungi keluarga, seminar atau konferensi, dan lain-lain.
- b. *Excursionist* (pelancong), pengunjung sementara yang melawat kurang dari 24 jam. Di daerah tujuan kunjungannya dan tidak menginap, termasuk penumpang kapal pesiar.

Definisi rujukan arti kata *visitor, tourist dan excersionist* ini digunakan di seluruh dunia. Namun, definisi bersama ini tidak selalu berlaku atau dilaksanakan di daerah perbatasan negara, misalnya: orang Indonesia yang bermukim di negara asing dan kembali ke Indonesia sementara waktu (dengan memakai paspor indonesia/tidak tercatat sebagai wisatawan). Selain itu, dalam melintas batas (*border crossing*) seperti dari kota Batam dan Singapura, setiap hari orang Singapura bekerja di Batam atau sebaliknya tidak tercatat sebagai wisatawan.

C. Bentuk dan Jenis Pariwisata

1. Bentuk Pariwisata

a. Menurut Asal Wisatawan

Berdasarkan asal wisatawan yang dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri, maka bentuk pariwisata yang asal wisatawannya dari dalam negeri atau dengan kata lain wisatawan hanya berpindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama itu mereka mengadakan perjalanan maka dapat disebut pariwisata domestik, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, yang disebut pariwisata aktif, sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

c. Menurut jangka waktu

Kedatangan seseorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d. Menurut jumlah wisatwan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah para wisatawan datang sendiri atau rombongan. Karena itu muncul istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, dan pariwisata mobil.

Pengklasifikasian istilah dalam bentuk-bentuk pariwisata penting dari segi ekonomi, utamanya terkait dengan sistem perpajakan dan perhitungan pendapatan dalam sektor industri pariwisata.

2. Jenis Pariwisata

a. Wisata Budaya

Wisata ini bertujuan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat-istiadat, budaya, dan seni mereka. Jenis wisata ini populer di Indonesia. Banyak wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia bertujuan untuk mengetahui kebudayaan, kesenian, dan segala sesuatu yang terkait adat-istiadat dan kehidupan seni budaya bangsa dan rakyat Indonesia. Jenis wisata ini terdapat dalam berbagai kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.



Gambar 1. Wisata Budaya: Ratusan umat Hindu melakukan upacara Melasti menyambut Hari Raya Nyepi di Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah yang turut dihadiri oleh banyak wisatawan.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/26/umat-hindu-lakukan-upacara-melasti-sambut-hari- raya-nyepi>.

b. Wisata Kesehatan

Perjalanan seseorang wisatawan untuk wisata kesehatan biasanya bertujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan dimana sehari-hari ia tinggal guna beristirahat untuk kesehatan jasmani dan rohani.



Gambar 2. Wisata Kesehatan: Permandian air panas Ciater, Jawa Barat.
Sumber: <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/07/11/406/1435301/tempat-wisata-ini-dicari-wisatawan-karena-untuk-kesehatan>

Selain itu, guna mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tempat yang mempunyai iklim dan udara yang menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olahraga

Wisata ini bermaksud untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau dengan sengaja bermaksud mengikuti pesta olahraga di suatu daerah atau negara lain seperti dalam pesta olahraga Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, Tour de France, dan Formula One.



Gambar 3. Wisata Olahraga: Asian Games 2018.

Sumber: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/07/pmj8p1416-menpar-tetapkan-sumsel-sebagai-unggulan-wisata-olahraga>

d. Wisata Komersial

Suatu perjalanan untuk mengunjungi kegiatan, misalnya pameran dagang dan industri dan pekan raya dapat dikategorikan sebagai wisata yang bersifat komersial. Awalnya wisata komersial ini tidaklah dapat digolongkan ke dalam dunia kepariwisataan, karena perjalanan serupa ini, seperti mengunjungi suatu pameran atau pekan raya hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai tujuan tertentu untuk urusan bisnis, namun pada kenyataannya saat ini kegiatan pameran atau pekan raya, banyak sekali dikunjungi oleh kebanyakan orang dengan tujuan ingin melihat-lihat dan melakukan transaksi/belanja terhadap barang-barang yang dipamerkan, dan tidak jarang kegiatan pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian, sehingga menarik untuk dikunjungi.



Gambar 4. Wisata Komersil: Ajang Jakarta Fair 2016.

Sumber:<https://avryzelmi.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pariwisata-disusun-oleh-23.html>

e. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kawasan perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri. Hal ini banyak dilakukan baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal.



Gambar 5. Wisata Industri: PT. Denso Indonesia dikunjungi oleh para pelajar.

Sumber: <http://bekasibae.com/gallery/wisata-industri-pt-denso/>

f. Wisata Politik

Jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti misalnya peringatan ulang tahun suatu negara, ulang tahun perayaan kemerdekaan suatu negara, penobatan Raja/Ratu dari negara kerajaan dan sebagainya. Di samping itu juga peristiwa-peristiwa seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini.



Gambar 6. Wisata Politik: Wisatawan asing turut serta dalam gerak jalan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

Sumber: <https://www.balipuspanews.com/bule-cantik-dari-penijuru-dunia-ikut-gerak-jalan-di-karangasem.html>

g. Wisata Konvensi

Wisata jenis ini mirip dengan wisata politik. Saat ini banyak negara mengembangkan wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.



Gambar 7. Wisata Konvensi: South Asian Diaspora Convention 2013.

Sumber: <http://www.wisatasingapura.web.id/2013/11/16/south-asian-diaspora-convention-2013-acaranya-pemimpin-bisnis/>

h. Wisata Sosial

Yang dimaksudkan dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah guna memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah atau dengan kata lain tidak mampu membayar segala sesuatu yang bersifat mewah untuk mengadakan perjalanan misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. Wisata ini biasa dilakukan oleh sebuah organisasi guna membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansial dalam mempergunakan kesempatan libur atau cuti mereka dengan mengadakan perjalanan.



Gambar 8. Wisata Sosial: Wisata sosial oleh para pelajar. Sumber: <https://sumut.kabardaerah.com/428-pelajar-mengikuti-tour-destinasi-wisata-di-hut-kota-medan-ke-428/>

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian merupakan pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya.



Gambar 9. Wisata Pertanian: Green House Lezatta, Sumatera Barat.
Sumber: <https://kumparan.com/langkanid/green-house-lezatta-wisata-imajinasi-yang-jadi-kenyataan-1534673593093459497>

Wisatawan yang berkunjung dapat melakukan peninjauan untuk tujuan studi maupun hanya untuk berkeliling sambil melihat-lihat dan menikmati segarnya tanaman yang beraneka warna serta pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan. Kegiatan wisata ini biasanya oleh Pusat-Pusat Pertanian disediakan pramuwisata yang bertugas memberikan penjelasan mengenai segala hal terkait obyek wisata pertanian tersebut kepada wisatawan.

j. Wisata Bahari

Jenis wisata bahari atau dikenal juga dengan nama wisata tirta banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air di pantai atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim seperti di Lautan Karibia, Hawaii, dan Tahiti Fiji. Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang menjadi spot wisata maritim ini, seperti di kawasan perairan Pulau Seribu di Teluk Jakarta, Bunaken di Sulawesi Utara, pantai Pulau Bali, gugusan

pulau-pulau kecil di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan, Taman Wisata di Kepulauan Maluku, dan Taman laut di Kepulauan Raja Ampat Papua Barat.



Gambar 10. Wisata Bahari: Taman Laut Raja Ampat, Papua Barat. Sumber: <https://www.idntimes.com/travel/destination/berlian-rahmy/7-wisata-bahari-gak-kalah-keren-dari-raja-ampat-1>

k. Wisata Cagar Alam

Wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

Wisata Cagar Alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau margasatwa serta pepohonan yang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, wisata ini juga banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, kehidupan liar binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain



Gambar 11. Wisata Cagar Alam: Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Sumber: <http://jadiberita.com/130914/berkunjung-ke-5-cagar-alam-terbaik-di-indonesia-bisa-wisata-sambil-belajar.html>

1. Wisata Berburu

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang diizinkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata berburu ini diatur dalam bentuk safari berburu ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika, untuk berburu gajah, singa, dan sebagainya.

Di India, ada daerah-daerah yang memang disediakan untuk berburu macan, badak, dan sebagainya, sedangkan di Indonesia, pemerintah membuka wisata berburu untuk daerah Baluran di Jawa Timur di mana wisatawan boleh menembaki banteng atau babi hutan. Pemerintah mengatur wisata berburu ini demi keseimbangan hidup satwa yang diburu tidak punah dan dengan memperhitungkan berkembangbiaknya satwa tersebut, yang mana antara yang lahir dan yang diburu tetap seimbang.

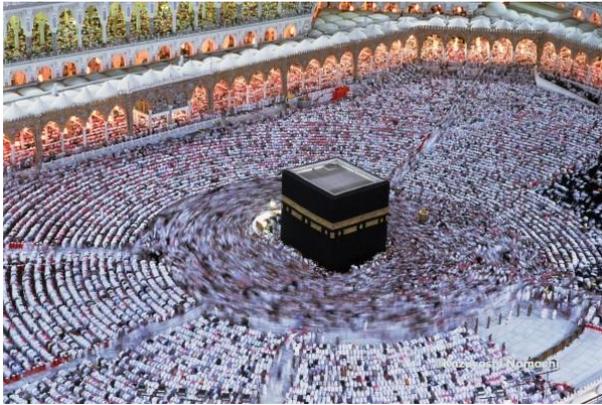


Gambar 12. Wisata Berburu: Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.
Sumber: <http://www.indosurvival.com/2018/12/informasi-lengkap-taman-nasional-baluran.html>

m. Wisata Pilgrim

Wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan. Wisata pilgrim banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, dan keteguhan iman.

Terkait hal tersebut, penganut agama Islam biasanya melakukan kunjungan ke tanah Suci Mekkah, Arab Saudi. Penganut Katholik misalnya melakukan kunjungan ke istana Vatikan di Roma, Italia. Penganut Buddha ke tempat-tempat suci agama Buddha misalnya di India, Nepal, dan Tibet. Di Indonesia, banyak tempat-tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama atau penganut kepercayaan tertentu, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, Pura Besaki di Bali, makam Wali Songo, Gunung Kawi, dan makam Bung Karno di Blitar.



Gambar 13. Wisata Pilgrim. Tanah suci Mekkah.

Sumber: <https://www.idntimes.com/travel/destination/reza-iqbal/sejarah-islam-wisata-religi-di-arab-saudi/full>

n. Wisata Petualangan

Wisata petualangan (*Adventure Tourism*) biasanya dilakukan oleh para wisatawan yang memiliki jiwa petualang, seperti mengunjungi hutan belantara yang belum pernah dijelajahi dan penuh binatang buas, mendaki tebing terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam, Bungy Jumping, arung jeram (*rafting*), dan wisata ruang angkasa.



Gambar 14. Wisata Petualangan: Arung Jeram.

Sumber: <http://www.padangpos.com/2017/01/esneti-pimpin-tiga-tim-arung-jeram.html>

o. Wisata Bulan Madu

Wisata ini diperuntukkan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Perjalanan wisata ini biasanya dilakukan selama sebulan setelah pernikahan berlangsung.



Gambar 15. Wisata Bulan Madu.

Sumber: <https://toptier.id/lokasi-wisata-romantis-khusus-bulan-madu/>

Demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, biasanya pihak hotel menyediakan fasilitas khusus untuk pasangan pengantin ini, misalnya kamar pengantin yang disediakan dengan peralatan serba istimewa yang meliputi tempat tidur yang istimewa, dekorasi dinding dengan selera tinggi, dan cermin besar di berbagai sudut termasuk langit-langit kamar.

Jenis wisata yang tersebut di atas sebenarnya masih bisa ditambahkan, tergantung dengan kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negara, termasuk misalnya jenis pariwisata berkelanjutan (ekowisata) yang akan dibahas pada bab VI, VII, dan VIII dalam buku ini. Makin kreatif dan banyak gagasan, maka makin bertambah pula jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan pariwisata.

D. Destinasi dan Atraksi Wisata

Destinasi merupakan sebuah kawasan spesifik yang dipilih oleh pengunjung yang mana mereka dapat tinggal selama waktu tertentu. Kata “destinasi” dapat juga digunakan untuk suatu kawasan terencana, yang sebagian atau seluruhnya dilengkapi dengan pelayanan produk wisata, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, atraksi, dan toko pengecer yang dibutuhkan oleh pengunjung.

Daerah destinasi dapat merupakan suatu propinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan suatu desa. Daerah ini harus memiliki fasilitas transportasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti hiburan dan pertokoan eceran, pemadam kebakaran, polisi, dan fasilitas kesehatan. Namun, yang paling utama, suatu daerah destinasi harus memiliki daya tarik atau atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan.

Atraksi dan ciri destinasi ini penting untuk keperluan wisata berkeliling (*sightseeing*), rekreasi, berbelanja, dan hiburan. Suatu atraksi wisata tidak hanya memperhatikan pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dengan menonjolkan karakteristik dan keunikan yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung.

Lebih jauh, cara penggolongan atraksi dan ciri-ciri destinasi wisata dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber daya alam seperti iklim, pantai dan hutan yang dimiliki
2. Sumber daya budaya seperti tempat bersejarah mesium, teater dan budaya masyarakat lokal.
3. Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan.
4. Event tahunan seperti Lovely Desember di Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
5. Aktifitas spesifik, seperti kasino di Genting High-land Malaysia, dan berbelanja di Singapura atau di Hong Kong

6. Daya tarik psikologis seperti romantik dan berpetualangan.

E. Sistem Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Suatu sistem DTW meliputi lima komponen yang saling terintegrasi, yaitu: (Gambar 16)

1. *Gateway* atau pintu masuk, pintu gerbang, jumlahnya satu atau lebih, berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan fery, terminal kereta api, atau terminal bus.
2. *Tourist center*, Pusat Pengembangan Pariwisata (PPP), yang dapat berupa suatu atau beberapa kawasan wisata (*resort*) atau suatu bagian kota yang ada.
3. *Attraction* atau atraksi, yang berkelompok satu atau lebih.
4. *Tourist corridor*, pintu masuk wisata, yang menghubungkan *gateway* dengan *tourist center* ke *Attraction*.
5. *Hinterland*, atau tanah yang tidak digunakan untuk ke empat komponen sebelumnya.

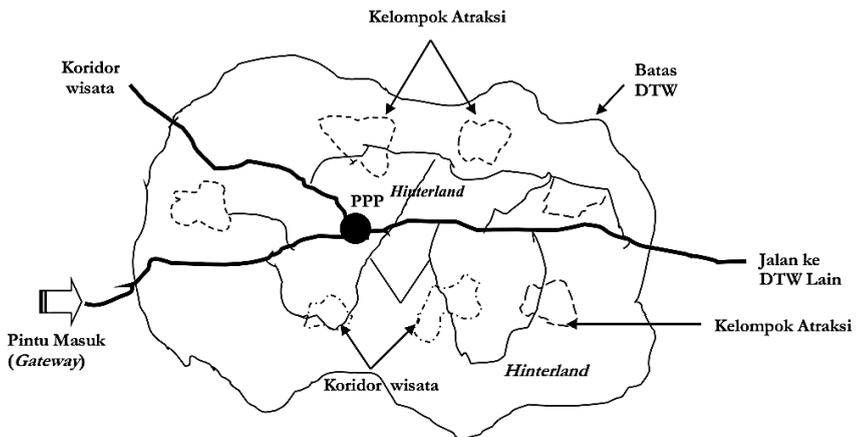
Wisatawan biasanya datang dan masuk melalui *gateway*, kemudian menuju PPP, di mana wisatawan menemukan akomodasi dan semua usaha jasa layanan pendukung wisata, seperti restoran, toko cenderamata, persewaan kendaraan dan lain-lain. Dari PPP wisatawan mengadakan perjalanan ke atraksi wisata, melewati koridor wisata. Sambil berjalan di koridor wisata, mereka menikmati pemandangan yang indah, dan kehidupan rakyat (desa, pengolahan tegalan, sawah, dan lain-lain) yang di sebut sebagai *hinterland*. *Hinterland* perlu tetap menarik, dan tidak diubah menjadi bangunan tinggi, pabrik dan sebagainya.

Atraksi berkelompok memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Mungkin mendatangi kelompok atraksi dengan kendaraan, lalu di dalam kelompok atraksi dengan berjalan kaki agar dapat mengamati dengan lebih rinci penghidupan desa. Makin banyak kelompok

atraksi yang bervariasi akan menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama dalam DTW.

Dengan tertariknya wisatawan melakukan perjalanan wisata berjalan kaki, mereka akan lebih lama tinggal di DTW. Sebaliknya, dengan menawarkan “*touring tourism*” naik kendaraan maka wisatawan akan melihat atraksi utama saja, dan tidak akan tinggal lama di DTW.

Tracking (berjalan kaki dan menginap) yang umumnya dilakukan di *hinterland*, banyak dilakukan dengan berjalan kaki, lewat jalan desa dan jalan setapak. Untuk *tracking* syarat utamanya adalah keamanan bagi wisatawan. Mereka umumnya bersedia menginap di tempat sederhana, namun kebersihan dan kenyamanan menjadi suatu prioritas dan tetap terjaga.



Gambar 16. Sistem Daerah Tujuan Wisata (DTW)

BAB III

INDUSTRI PARIWISATA: JENIS USAHA DAN PERLENGKAPAN

Sering menjadi pertanyaan apakah pariwisata merupakan sebuah industri seperti industri kendaraan bermotor, elektronik, material dan sebagainya, dikarenakan industri umumnya di identikkan dengan *manufacturing* atau industri produksi barang. Dalam hal ekonomi, industri dihubungkan dengan kuota eksport/import, tarif tenaga kerja, dan hal lainnya yang penting untuk ekonomi nasional. Masalah lain bahwa industri pariwisata bukan suatu industri, tetapi faktanya merupakan suatu kumpulan bisnis yang menjajakan jasa pariwisata yang terangkum, misalnya dalam industri penerbangan, industri perhotelan, bisnis hiburan, sedangkan usaha yang melayani wisatawan seperti restoran, rekreasi, perbelanjaan, dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut saling terkait dan saling bergantung yang mana sektor swasta banyak terlibat di dalamnya, sedangkan pemerintah sendiri bertindak dalam menyediakan prasarananya.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan termasuk dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa usaha pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek pariwisata, usaha barang pariwisata, dan usaha lain yang terkait dalam bidang tersebut. Defenisi yang lain disebutkan sebagai suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa pariwisata merupakan suatu industri, namun bukan industri yang sifatnya homogen, tetapi heterogen dan banyak macamnya. Sebagai contoh, sebagai industri pendukung pariwisata (IPP), di samping industri perhotelan yang merupakan industri penting dalam kepariwisataan. IPP terdiri dari puluhan macam toko pengecer, sektor transportasi lokal, makanan dan minuman, hiburan, perbelanjaan dan cenderamata, salon pangkas rambut, pijat dan lain-lain. IPP memiliki keterkaitan dengan pariwisata karena IPP memberi layanan langsung kepada konsumen dalam hal ini para wisatawan/pelancong.

A. Jenis Usaha dalam Industri Pariwisata

Dalam industri pariwisata, jenis usaha dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan Pariwisata Utama Langsung

Perusahaan pariwisata utama langsung adalah semua perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus yang diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupan usahanya memang benar-benar tergantung padanya. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini terbagi atas tiga yang diistilahkan dengan obyek sentra dan subyek sentra serta penggabungan atas keduanya, yang tergantung pada kegiatan

perusahaan-perusahaan itu sendiri, apakah kegiatan itu termasuk objek atau subjek pariwisata atau keduanya. Perusahaan-perusahaan tergolong dalam objek sentra:

1. Perusahaan akomodasi, termasuk hotel, penginapan, motel, losmen, peristirahatan, tempat berlibur, asrama, pemondokan, bungalow, kamar sewaan, perkemahan, homestay *inn* dan lain sebagainya.
2. Tempat peristirahatan khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, termasuk permandian khusus untuk orang sakit, spa, *streambath*, peristirahatan dengan panti pijatnya, sanatorium dan sebagainya.
3. Perusahaan angkutan pariwisata, termasuk pengangkutan udara, laut, maupun seperti pengangkutan dengan kereta api, bis yang telah ditetapkan bagi pengangkutan umum tidak termasuk dalam kategori perusahaan angkutan pariwisata. Tetapi mobil, bus, kereta api, pesawat udara atau kapal laut yang dipergunakan khusus untuk keperluan pariwisata, piknik, berlayar pesiar (*cruise*), bersenang-senang dan alat-alat pengangkutan yang diborong (*charter*) untuk keperluan tersebut, mobil atau sepeda motor (*rental car or motorcycle*) dan sebagainya yang khusus disewakan kepada wisatawan adalah termasuk kategori perusahaan angkutan pariwisata.
4. Perusahaan pengrajin atau manufaktur, seperti perusahaan kerajinan tangan atau barang-barang kesenian (*souvenir*), kartu pos bergambar untuk wisatawan, penerbitan buku-buku petunjuk bagi kepariwisataan dan lain sebagainya.
5. Toko-toko penjual souvenir, seperti barang-barang kerajinan tangan atau benda-benda lain khusus untuk wisatawan.
6. Usaha-usaha khusus yang menyediakan dan menyajikan tempat-tempat rekreasi dan hiburan lain-lain khusus untuk wisatawan.

7. Organisasi atau usaha yang menyediakan pramuwisata (*guide*), penerjemah, sekretaris, juru transkripsi, perlengkapan konvensi dan sebagainya.
8. Lembaga khusus yang mempromosikan pariwisata dengan jalan mengelola, mengatur perbaikan, dan kebersihan objek-objek yang dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Sedangkan untuk perusahaan–perusahaan pariwisata yang termasuk dalam kategori subjek sentra adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha-usaha bagi orang yang merasa tertarik akan kebutuhan untuk mengadakan perjalanan atau memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati perjalanan apabila mereka sendiri tidak mampu untuk berbuat demikian, seperti:

1. Perusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi pariwisata secara umum atau khusus.
2. Usaha-usaha yang membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (*travel bank*), usaha kredit pariwisata (*travel credit*), badan-badan yang membiayai wisata sosial atau wisata remaja.
3. Perusahaan asuransi pariwisata seperti asuransi kecelakaan, sakit, biaya rumah sakit, kematian pada waktu mengadakan perjalanan wisata.

Golongan ketiga adalah perusahaan pariwisata yang menyangkut objek maupun subjek pariwisata sendiri. Adapun kegiatan usahanya adalah terdiri dari bentuk, hubungan dengan kedua kategori yang tersebut terdahulu di atas. Prototip bentuk hubungan ini adalah biro perjalan umum dan agen perjalanan yang mempunyai dua fungsi, yaitu keagenan pariwisata dan pengaturan perjalanan. Tugasnya adalah membawa subjek pariwisata ke objek pariwisata, dengan jalan menyajikan objek tersebut bagi kebutuhan wisatawan sebagai subjek (dalam hal ini fungsinya adalah pengaturan

perjalanan) atau dengan jalan mengatur objek pariwisata yang dikehendaki oleh subjek pariwisata (di sini fungsinya adalah sebagai agen pariwisata atau agen perjalanan). Tugas dari Biro Perjalanan Umum seperti menyusun dan menjual paket wisata luar dan dalam negeri kepada masyarakat umum calon wisatawan atau atas permintaan, menyelenggarakan atau menjual pelayanan wisata, menyelenggarakan pemanduan wisata, menyediakan fasilitas sewa mobil untuk wisatawan, menjual tiket/karcis sarana angkutan, mengadakan pesanan sarana wisata, dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agen perjalanan sendiri memiliki tugas, seperti: menjual tiket/karcis, sarana angkutan dan lain-lain, mengadakan pesanan sarana wisata dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori ketiga di atas memiliki hubungan yang sangat luas dengan berbagai bidang dalam kegiatan lalu-lintas pariwisata. Dengan hubungan-hubungan yang bersifat utama dan kompleks berganda ini, biro perjalanan dalam segala kegiatannya menimbulkan usaha-usaha dan kontrak-kontrak baru, baik dalam hubungan nasional maupun internasional, karena hubungan yang diadakan oleh biro perjalanan tidak saja terbatas pada hubungannya dengan perusahaan akomodasi, melainkan juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti tersebut dalam dua golongan sebelumnya.

2. Perusahaan Pariwisata Sekunder Tak Langsung

Perusahaan pariwisata sekunder tak langsung tidak sepenuhnya tergantung pada wisatawan saja, tetapi juga sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Namun demikian, perusahaan yang termasuk dalam kategori ini memiliki peranan penting dan diperlukan, lebih-lebih yang menyangkut usaha di bidang pangan (*catering*), yaitu perusahaan-perusahaan yang kegiatannya mengadakan makanan dan minuman seperti misalnya

restoran dan warung makan, yang dalam terbuka bagi umum dan wisatawan. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang tersebut di bawah ini dapat digolongkan ke dalam perusahaan pariwisata sekunder tak langsung, seperti:

1. Perusahaan yang membuat kapal-kapal khusus untuk wisatawan seperti kapal pesiar (*cruise ship*), gerbong-gerbong khusus untuk wisatawan, mobil-mobil dan bis, motorboat dan sebagainya, yang khusus dibuat untuk kesenangan para wisatawan.
2. Toko-toko pakaian, perhiasan wanita dan batu permata, kamera, alat-alat kecantikan, barang-barang keperluan sehari-hari dan sebagainya.
3. Toko binatu, tukang cukur, toko ahli kecantikan, salon kecantikan dan sebagainya.

B. Perlengkapan dalam Industri Pariwisata

Dalam membahas perlengkapan dalam industri pariwisata, dua faktor harus kita pisahkan satu sama lain, yakni pertama faktor yang termasuk subyek (wisatawan) dan kedua faktor yang tergolong dalam obyek pariwisata (perlengkapan industri pariwisata). Pariwisata pada hakikatnya dihubungkan dengan barang dan pelayanan jasa yang menyajikan kenyamanan, dan juga kemewahan serba mewah. Karena itu, pariwisata digolongkan ke dalam sektor ketiga terkait prinsip produksi ekonomi, setelah agraria dan industri. Mengingat kemajuan yang dicapai dalam bidang mekanisasi, otomatisasi, spesialisasi, komunikasi, serta mengingat aspirasi manusia masa kini, maka pariwisata sebagai sektor ketiga dalam prinsip produksi ekonomi akan berkembang terus secara luas di masa-masa akan datang, terlebih lagi dengan kemajuan teknologi internet dan jasa layanan online untuk keperluan reservasi bagi wisatawan yang ingin berlibur secara cepat dan efisien.

Secara garis besar perlengkapan industri pariwisata dari segi kegiatannya dibedakan dalam empat hal, yakni transportasi, akomodasi, perusahaan pangan, dan perusahaan jasa.

1. Transportasi

Transportasi atau pengangkutan sangat menentukan antara jarak dan waktu dalam perjalanan sehingga merupakan salah satu unsur utama langsung dalam pariwisata. Transportasi berpengaruh dalam pergerakan roda industri pariwisata. Adapun alat dan perlengkapan transportasi dikategorikan sebagai berikut:

a. Pengangkutan dengan kapal

Pengangkutan dengan kapal, motorboat, fery, perahu layar dan sebagainya, seperti halnya dengan kereta api dan pengangkutan udara, apabila dipergunakan dalam hubungan jaringan-jaringan dan rutin pengangkutan umum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai alat dan perlengkapan pariwisata. Tetapi apabila ia dipergunakan untuk tujuan pariwisata, maka ia tergolong di dalamnya. Pengangkutan dengan kapal ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a) di danau, seperti di Danau Toba, di mana biasanya dilakukan pelayaran-pelayaran untuk bertamasya dan berkeliling.
- b) di sungai, seperti di Sungai Musi dan Kapuas, di mana biasanya dilakukan pelayaran-pelayaran untuk bersenang-senang, bertamasya, dan berolahraga.
- c) di laut, di mana pengangkutan dapat dibagi tiga, yakni pelayaran teratur, pelayaran biasa, dan pelayaran penyeberangan dengan fery. Pelayaran teratur atau disebut pula pelayaran regular menjamin pula transportasi bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi sebaliknya pelayaran pesiar atau disebut juga *cruise* dalam keseluruhannya bersifat kepariwisataan, di mana kapal-

kapal khusus disediakan untuk berlayar menuju tempat-tempat objek pariwisata dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, bahkan tidak jarang pula ada yang mengelilingi dunia. Pelayaran penyeberangan dengan ferry, seperti halnya pelayaran teratur, selain untuk melayani kepentingan umum dalam rute-rute biasa, juga menjamin transportasi bagi wisarawan, seperti menyeberangi Selat Sunda (Merak-Bakahuni), dan sebagainya.

b. Pengangkutan dengan kereta api

Untuk pengangkutan darat jarak jauh dalam bidang pariwisata, kereta api yang paling banyak digunakan dan diuntungkan, lebih-lebih di suatu negara di mana objek-objek pariwisatanya terdapat jarak dan lingkungan yang dihubungkan dengan lalu-lintas kereta api, terkadang juga biasanya bahwa seluruh gerbong kereta api memang khusus disediakan bagi wisatawan-wisatawan, yang disebut kereta api wisata (*tourist train*). Karena situasi letak dan lingkungan, ada kalanya kereta api wisata ini berbentuk kereta api kabel yang meluncur di bawah kabel, kereta api puncak, kereta api tambang, kereta Swiss, dan sebagainya.

c. Pengangkutan dengan mobil dan bis

Perjalanan dengan mobil menunjukkan jumlah yang semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena mobil dapat dipergunakan secara praktis, kenyamanan lebih bisa dinikmati, dan kecepatan lebih bisa di atur sendiri bahkan ada pula perusahaan yang mengkhususkan diri untuk melayani orang-orang bisnis dan wisatawan dengan menyewakan mobil berikut sopirnya. Sistem penyewaan mobil ini disebut *car rental* dan banyak digemari dewasa ini di Indonesia. Di samping mobil, terdapat pula perlengkapan pariwisata berupa bis yang memiliki daya angkut yang lebih besar. Namun, untuk di daerah-daerah tujuan wisata yang letaknya terpencil tetapi ramai dikunjungi wisatawan luar negeri,

perlengkapan pariwisata dengan alat pengangkutan yang lebih praktis dan sederhana banyak menggunakan kuda, andong, dokar, sampan, becak, dan sebagainya.

d. Pengangkutan dengan pesawat udara

Dewasa ini, pengangkutan dengan udara telah menduduki tempat paling istimewa, maka perlengkapan industri pariwisata dengan alat pengangkutan semacam ini, makin merasa dibutuhkan. Apalagi bagi negara kepulauan seperti Indonesia di mana jarak dari satu pulau/daerah ke pulau/daerah lain cukup jauh, maka alat transportasi dengan pesawat udara ini merupakan suatu kebutuhan yang penting.

2. Akomodasi dan Perusahaan Pangan

Salah satu bentuk akomodasi dan merupakan salah satu perlengkapan pariwisata yang utama adalah hotel. Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan dan bertujuan komersial.

Klasifikasi hotel umumnya dibagi berdasarkan:

1. Kenyamanan (*comfort*) dan harga sehingga menimbulkan adanya hotel kelas deluks, kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.
2. Lamanya seseorang tamu tinggal menginap, terdiri atas hotel musiman (*seasonal hotel*), hotel transit, hotel residensi yang menerima tamu untuk tinggal dalam jangka waktu panjang tetapi tidak menetap.
3. Letaknya, maka hotel dapat dibagi menjadi hotel kota, hotel pegunungan, hotel pantai dan hotel di pedalaman.

4. Kesibukan lalu-lintas, terdiri atas hotel stasiun, hotel pelabuhan, hotel lintas (*highway hotel*) yang terletak di pinggir jalan raya lintas biasanya disebut juga motel.
5. Jumlah kamar yang tersedia dalam suatu hotel, maka hotel itu dapat dibagi menjadi hotel kecil, hotel menengah dan hotel besar. Di Indonesia hotel yang telah memiliki kamar dengan jumlah 100 ke atas di sebut hotel besar.
6. Pemiliknya, maka hotel dapat terdiri atas hotel perorangan, hotel kepunyaan keluarga, hotel perusahaan bersama dan hotel negara (pemerintah).
7. Perencanaan yang dilaksanakan, terdiri atas hotel penuh atau full hotel, yang berarti menyediakan makanan lengkap, sarapan, makan siang dan malam yang diperhitungkan bersama-sama dengan sewa kamar.
8. Jangka waktu perusahaan beroperasi, maka dapat dibagi menjadi hotel yang hanya dibuka hanya setengah tahun misalnya pada musim panas atau musim dingin.

Selanjutnya penentuan golongan hotel-hotel didasari oleh tanda bintang yang dimiliki yang dinyatakan dengan sertifikat kelainan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pariwisata dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan ISO 17021:2015.

Selain hotel, jenis akomodasi lainya yang dikenal seperti:

1. *Pension* adalah hotel kecil yang menyediakan makan pagi bagi para tamu dengan tarif tertentu. Perlengkapan di atur menurut tingkat dan kepentingan tamunya.
2. *Herberg* atau inn adalah penginapan dalam bentuk sederhana, biasanya hanya menyediakan minuman, tempatnya di daerah pinggiran kota atau daerah pedalaman.

3. *Hospiz* adalah penginapan di pegunungan terutama di wilayah pegunungan Alpen.
4. *Apartemen* adalah penginapan untuk jangka waktu agak lama, biasanya pada waktu musim panas atau musim libur.
5. *Bungalow* adalah bangunan atau rumah-rumah yang menyediakan atau tidak mungkin pula tidak menyediakan makanan, terletak di pinggiran kota.
6. *Pondok* atau *cottage* adalah penginapan dengan bangunan-bangunan dengan gaya lokal dengan bahan-bahan lokal pula.
7. *Homestay* adalah rumah-rumah penduduk setempat di suatu daerah tujuan wisata yang digunakan sebagai penginapan sementara bagi wisatawan.
8. *Foresterie* bangunan yang terletak di pinggir hutan atau lereng gunung dengan perabotan sederhana, yang juga menyediakan makanan, disewakan bagi orang-orang atau kafilah yang tinggal untuk beberapa hari dalam perjalanan mereka melintasi hutan, pegunungan atau perbatasan.

3. Perusahaan Pangan

Perusahaan pangan atau *catering trade* merupakan salah satu perlengkapan industri pariwisata terkait dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan dalam mengadakan perjalanan dengan harapan dapat makan dan minum yang enak dan membangkitkan selera. Namun, dalam pelaksanaannya hal ini juga tidak terlepas bagaimana menghadirkan pada dapur yang baik dan bersih, dan penyajian dan tata pelayanan yang baik pula kepada para wisatawan. Lebih jauh perusahaan pangan tidak saja menggantungkan diri kepada wisatawan, melainkan juga melayani kebutuhan makanan dan minuman masyarakat umum setiap harinya. Wisatawan hanyalah tambahan bagi pendapatan perusahaan pangan ini, namun pada suatu daerah tujuan wisata dan termasuk pada musim kunjungan

tertentu wisatawan merupakan orang terbanyak dan terutama membutuhkan makanan dan minuman.

4. Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa yang kita maksudkan disini adalah perusahaan jasa industri pariwisata (*tourist service trade*), yang ditinjau dari segi kegiatan dan bidang gerakannya secara ekonomis menggantungkan diri sepenuhnya kepada pariwisata. Perusahaan-perusahaan jasa pariwisata tersebut, antara lain:

a. Perusahaan perjalanan

Perusahaan perjalanan (seperti Biro Perjalanan dan agen perjalanan) merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mempersiapkan perjalanan (*trip/tour*) bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan. Perusahaan perjalanan ini mempunyai kegiatan dalam dua hal yakni:

- a) Kegiatannya dipusatkan pada usaha sebagai perantara antara wisatawan di satu pihak dan pengusaha pengangkutan atau hotel di lain pihak atas dasar komisi.
- b) Kegiatannya dipusatkan pada pengaturan perjalanan atas inisiatif dan resiko sendiri.

Di Indonesia, usaha dan kegiatan perusahaan perjalanan terbagi atas tiga jenis perusahaan yaitu Biro Perjalanan Umum, Agen Perjalanan, dan Cabang Biro Perjalanan Umum dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Biro Perjalanan Umum adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan;
- 2) Agen Perjalanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata.
- 3) Cabang Biro Perjalanan Umum adalah satuan usaha dari suatu Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di

tempat yang sama atau di tempat yang lain dan yang memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Biro Perjalanan Umum.

Kegiatan-kegiatan usaha baik oleh Biro Perjalanan Umum, Agen Perjalanan, dan Cabang Biro Perjalanan Umum biro memiliki kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menjual paket wisata ke luar negeri kepada umum atau atas permintaan
 - b. Menyelenggarakan dan menjual pelayaran pariwisata (*cruise*)
 - c. Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas permintaan
 - d. menyelenggarakan pemanduan wisata (*guiding and tour conducting*)
 - e. Menyediakan fasilitas sewa mobil untuk wisatawan
 - f. Menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain
 - g. Mengadakan pemesanan sarana wisata
 - h. Mengurus dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Agen Perjalanan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain
 - i. Mengadakan sarana wisata
 - j. Menguruskan dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Perusahaan jasa wisata tambahan

Perusahaan jasa wisata tambahan bergerak di bidang yang lebih khusus dan dalam prakteknya merupakan kerja tambahan dan dibutuhkan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan

akomodasi ataupun perusahaan perjalanan itu sendiri, misalnya pelayanan pramuwisata (*guide service*) yang memberi keterangan dan penjelasan mengenai tempat yang dikunjungi, penuntun wisata yang bertindak sebagai pramuwisata dan juga sebagai pemimpin perjalanan, pelayanan angkutan barang, dan pelayanan darma wisata yang menyelenggarakan dalam kota, dalam satu daerah tujuan wisata dan sebagainya.

c. Perusahaan hiburan

Perusahaan hiburan dimaksudkan di sini adalah usaha-usaha yang menyelenggarakan hiburan (*entertainment*) bagi para pengunjung atau wisatawan dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, pementasan, kontes, permainan dan lainnya, seperti karnaval, kabaret, festival, dan kasino.

d. Perusahaan penukaran uang

Di samping bank yang bertugas untuk melakukan transaksi uang asing, ada pula perusahaan-perusahaan sebagai tempat penukaran mata uang asing (*money changer*) yang langsung berada di bawah pengawasan pemerintah, di tempat-tempat seperti bandar udara atau pelabuhan laut, stasiun kereta api, wilayah atau daerah tujuan wisata, pusat-pusat perbelanjaan. Di negeri di mana industri pariwisatanya telah maju, terdapat bank pariwisata (*travel bank*) yang khusus bergerak di bidang perbankan industri ini.

e. Asuransi wisata.

Perusahaan asuransi bergerak di segala bidang, termasuk pula sektor industri pariwisata. Perusahaan asuransi wisata menjamin kalau terjadi kecelakaan, sakit, kehilangan selama mengadakan perjalanan bagi sang wisatawan.

f. Perusahaan jasa konsultan wisata

Perusahaan jasa konsultan wisata lahir seiring semakin berkembang dan majunya sektor industri pariwisata. Dengan

pengetahuan mendalam dan pengalaman yang banyak terkait sektor pariwisata, namun minim dalam hal permodalan, perusahaan ini hadir guna memberikan layanan konsultan bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan mengenai seluk beluk, antara lain mengenai perhotelan, restoran, kawasan wisata, objek dan daya tarik wisata, daerah tujuan wisata, promosi dan pemasaran wisata, dan sebagainya. Tidak jarang perusahaan jasa konsultan wisata ini menjadi konsultan pengelola (*management consultant*) suatu destinasi wisata.

BAB IV

PERWILAYAHAN DAERAH TUJUAN WISATA DI INDONESIA

Dengan jumlah pulau sebanyak 16.605 buah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sesungguhnya Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan beragam yang menarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pulau-pulau besar dan kebanyakan pulau-pulau kecil ini telah terdaftar dan memiliki koordinat serta telah memiliki nama melalui forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), yang berlangsung 7 – 18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaan program pembangunan industri pariwisata, pengetahuan terkait perwilayahan pariwisata perlu diketahui karena industri pariwisata di bangun atas dasar perwilayahan. Perwilayahan ini sangat penting karena Indonesia memiliki potensi luas dan beraneka warna, baik yang merupakan potensi tidak bergerak, seperti keindahan alam, monumen, candi, dan sebagainya, maupun atraksi bergerak yang mana faktor manusia

memegang peranan penting, seperti kesenian, adat-istiadat, seremoni, perayaan, pekan raya dan sebagainya.

Perwilayahan dalam dunia kepariwisataan adalah pembagian wilayah-wilayah pariwisata yang dapat dianggap memiliki potensi, selanjutnya dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata/DTW (*tourist destination area*), yang batasnya terkait dengan tempat atau daerah yang karena aktraksinya, situasinya dalam hubungan lalu-lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan.

Sebagai DTW, sebuah daerah atau wilayah memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni:

1. Memiliki atraksi atau objek yang menarik (terkait keindahan alam, kebudayaan, politik, lalu-lintas, dan sebagainya).
2. Mudah diakses dengan alat-alat transportasi.
3. Menyediakan tempat tinggal sementara.

Di berbagai negara, penggolongan DTW didasari oleh faktor-faktor, sebagai berikut:

1. DTW tergantung atas kondisi alam yang dimiliki. Tergolong dalam daerah tujuan ini:
 - a. Tempat berlibur pada musim-musim tertentu (liburan musim panas atau musim dingin).
 - b. Tempat beristirahat untuk kesehatan, seperti misalnya sumber atau mata air panas yang mengandung mineral, atau tempat yang mempunyai hawa udara segar, seperti daerah pegunungan atau pantai.
- e. DTW tergantung atas kebudayaan. Dalam kategori ini termasuk:
 1. Kota-kota bersejarah, monumen, teater dan sebagainya.

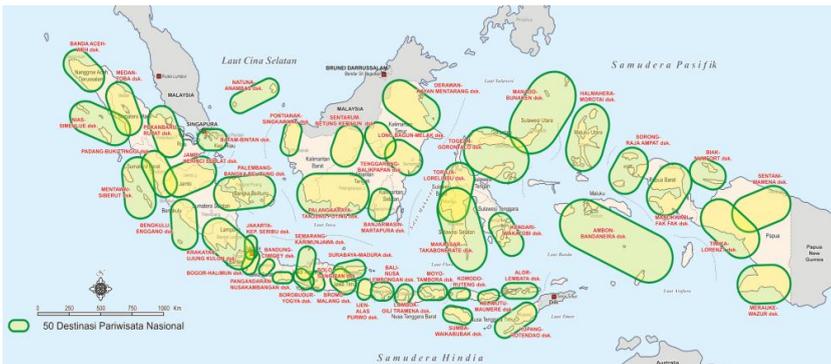
2. Pusat pendidikan seperti misalnya universitas, lembaga ilmiah dan sebagainya.
 3. Tempat yang mempunyai acara-acara khusus seperti perayaan, adat-istiadat, pesta rakyat an sebagainya.
 4. Pusat peribadatan seperti mesjid, gereja, pura, dan sebagainya.
- f. DTW tergantung atas lalu lintas. Daerah tujuan ini meliputi:
1. Daerah pelabuhan laut,
 2. Pertemuan lalu-lintas kereta api;
 3. Persimpangan lalu-lintas kendaraan bermotor;
 4. Daerah pelabuhan udara.
- g. Daerah Tujuan Wisata tergantung atas kegiatan ekonomi. Termasuk dalam kategori ini:
1. Pusat perdagangan dan perindustrian
 2. Pusat-pusat bursa dan pekan raya
 3. Tempat-tempat yang mempunyai institut perekonomian atau peristiwa-peristiwa ekonomi seperti pameran, pekan industri, instalasi pabrik dan sebagainya.
- h. DTW tergantung pada kegiatan politik. Termasuk dalam golongan ini:
1. Ibukota atau pusat pemerintahan,
 2. Tempat-tempat yang mempunyai institut politik dan kegiatan-kegiatan politik seperti kongres, konferensi, dan sebagainya.

Penanganan pembangunan wilayah untuk dijadikan daerah tujuan wisata saat ini menunjukkan kemajuan yang pesat. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kebijakannya melandaskan

pembangunan DTW atas dasar pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Tersedianya prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas lain serta besarnya potensi kepariwisataan di daerah yang bersangkutan,
2. Asas pemerataan pembangunan, sehingga pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan secara bersamaan tanpa mengabaikan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh tiap daerah/wilayah.

Berdasarkan pendekatan pokok-pokok pikiran tersebut, pembangunan dan pengembangan 50 DTW yang merupakan destinasi pariwisata nasional (DPN) dan tersebar di 33 propinsi telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Secara lengkap peta sebaran atau perwilayahan pembangunan dan pengembangan DPN disajikan sebagai berikut (Gambar 17 dan Tabel 1):



Gambar 17. Peta Sebaran 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)
Sumber: PP No. 50 Tahun 2011

Tabel 1. 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional

No.	Propinsi	No.	Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)
1	Nangroe Aceh Darussalam	1	DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya
2	Sumatera Utara	2	DPN Nias-Simeulue dan sekitarnya
		3	DPN Medan-Toba dan sekitarnya
3	Sumatera Barat	4	DPN Mentawai-Siberut dan sekitarnya
		5	DPN Padang-Bukit tinggi dan sekitarnya
4	Riau	6	DPN Pekanbaru-Rupat dan sekitarnya
5	Jambi	7	DPN Jambi-Kerinci Seblat dan sekitarnya
6	Kepulauan Riau	8	DPN Batam-Bintan dan sekitarnya
		9	DPN Natuna-Anambas dan sekitarnya
7	Bangka Belitung	10	DPN Babel-Palembang dan sekitarnya
8	Sumatera Selatan		DPN Babel-Palembang dan sekitarnya
9	Bengkulu	11	DPN Bengkulu-Enggano dan sekitarnya
10	Lampung	12	DPN Krakatau-Ujung Kulon dan sekitarnya

11	Banten		DPN Krakatau-Ujung Kulon dan sekitarnya
12	Daerah Khusus Ibu Kota	13	DPN Jakarta-Kep. Seribu dan sekitarnya
13	Jawa Barat	14	DPN Bogor-Halimun dan sekitarnya
		15	DPN Bandung-Ciwidey dan sekitarnya
14	Jawa Tengah	16	DPN Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya
		17	DPN Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya
		18	DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	19	DPN Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya
16	Jawa Timur	20	DPN Bromo-Malang dan sekitarnya
		21	DPN Surabaya-Madura dan sekitarnya
		22	DPN Ijen-Alaspurwo dan sekitarnya
17	Bali	23	DPN Bali-Nusa Lembongan dan sekitarnya
18	Nusa Tenggara Barat	24	DPN Lombok-Gili Tramena dan sekitarnya
		25	DPN Moyo-Tambora dan sekitarnya

19	Nusa Tenggara Timur	26	DPN Komodo-Buteng dan sekitarnya
		27	DPN Kelimutu-Meumere dan sekitarnya
		28	DPN Sumba-Wakabubak dan sekitarnya
		29	DPN Alor-Lembata dan sekitarnya
		30	DPN Kupang-Rotendao dan sekitarnya
20	Kalimantan Barat	31	DPN Pontianak-Singawang dan sekitarnya
		32	DPN Sentarum-Betung Kerihun dan sekitarnya
21	Kalimantan Tengah	33	DPN Palangkaraya-Tanjung Puting dan sekitarnya
22	Kalimantan Timur	34	DPN Long Bagun-Melak dan sekitarnya
		35	DPN Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya
		36	DPN Derawan-Kayan Mentarang dan sekitarnya
23	Kalimantan Selatan	37	DPN Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya
24	Sulawesi Selatan	38	DPN Makassar-Takabonerate dan sekitarnya
			DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya

25	Sulawesi Barat	39	DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya
26	Sulawesi Tengah	40	DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya DPN Togean-Gorontalo dan sekitarnya
27	Gorontalo		DPN Togean-Gorontalo dan sekitarnya
28	Sulawesi Utara	41	DPN Manado-Bunaken dan sekitarnya
29	Sulawesi Tenggara	42	DPN Kendari-Wakatobi dan sekitarnya
30	Maluku Utara	43	DPN Halmahera-Morotai dan sekitarnya
31	Maluku	44	DPN Ambon-Bandaneira dan sekitarnya
32	Papua Barat	45	DPN Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya
		46	DPN Manokwari-Fak-fak dan sekitarnya
33	Papua	47	DPN Biak-Numfor dan sekitarnya
		48	DPN Sentani-Wamena dan sekitarnya
		49	DPN Timika-Lorentz dan sekitarnya
		50	DPN Merauke-Wazur dan sekitarnya

Sumber: PP No. 50 Tahun 2011

BAB V

PERENCANAAN

PARIWISATA

A. Pengertian dan Manfaat Perencanaan Wisata

Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama dan mendasar serta menjadi titik awal bagi fungsi-fungsi berikutnya. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha membuat rencana atau membuat intisari yang lengkap dan terperinci mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk dikerjakan dan bagaimana melaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Beberapa ahli mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: G.R. Terry “Perencanaan merupakan pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa depan yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki”. H. Koontz & O’Donnell “Perencanaan tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program”. W.H. Newman “Perencanaan adalah pengambilan keputusan pendahuluan atas apa yang akan dilakukan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan

bahwa perencanaan adalah kegiatan yang menggambarkan di muka untuk hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Inti perencanaan adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Perencanaan bukanlah sekedar persiapan, akan tetapi, merupakan proses kegiatan secara terus menerus mengikuti mewarnai kegiatan hingga tujuan tercapai. Perencanaan juga merupakan alat evaluasi yang hasilnya di harapkan dapat menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Perencanaan wisata pada hakikatnya adalah kegiatan untuk memberikan gambaran atas wisata yang akan adakan atau di selenggarakan. Perbedaan penting antara perencanaan pada umumnya dengan perencanaan wisata terletak pada aspek teknisnya.

Manfaat dibuatnya perencanaan wisata sebagai berikut:

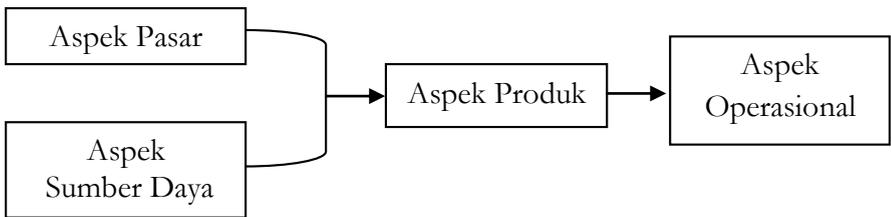
1. Sebagai pedoman penyelenggaraan wisata
2. Sebagai sarana untuk memprediksi kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus bagaimana alternatif pemecahanya.
3. Sebagai sarana untuk mengarahkan penyelenggaraan wisata sehingga wisata yang efektif dan efisien dapat tercapai.
4. Sebagai alat ukur, pengawasan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan wisata, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan wisata selanjutnya.

B. Aspek-Aspek Perencanaan Wisata

Aspek-aspek yang meliputi sebuah perencanaan wisata yang perlu mendapat kajian dan perhatian khusus, sebagai berikut:

1. Aspek pasar, menyangkut kondisi pasar serta kebutuhanya.
2. Aspek sumber daya, meliputi sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia.

3. Aspek produk yang berkaitan dengan produk wisata yang dihasilkan yang berisikan program-program, perhitungan harga dan penentuan kebijaksanaan produk.
4. Aspek operasional, menyangkut kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan produk wisata yang meliputi kegiatan pra, selama dan pasca penyelenggaraan.



Gambar 18. Aspek-Aspek Perencanaan Wisata

Perpaduan antara aspek pasar dan sumber daya (sumber daya manusia) akan menghasilkan sebuah produk, kemudian dilakukan tindak lanjut berupa perlakuan terhadap produk tersebut melalui kegiatan operasional.

C. Perencana Wisata

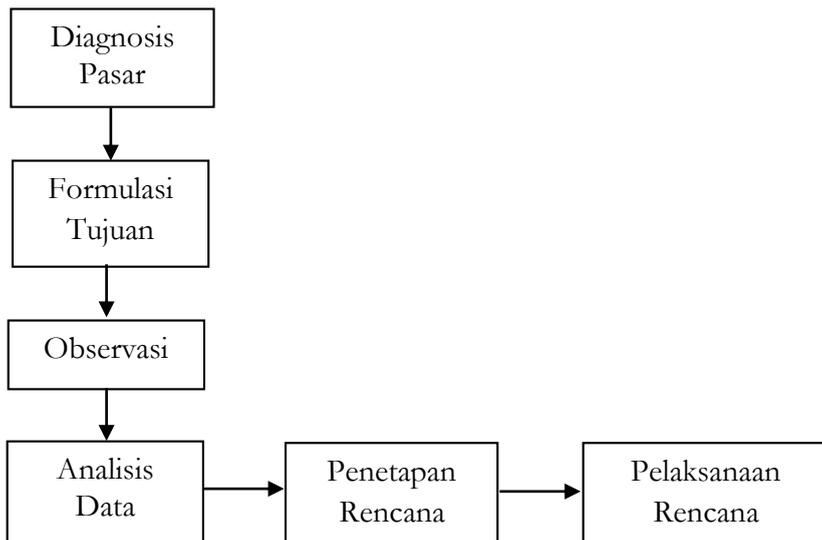
Perencana wisata (*tour planner*) adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan sebuah wisata. Tugas dan tanggungjawab seorang perencana wisata tidaklah mudah. Seorang perencana wisata harus dapat menjamin berlangsungnya atau terselenggaranya sebuah kegiatan wisata dengan baik, efektif dan efisien. Untuk itu seorang perencana wisata hendaknya memiliki kemampuan diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat berpikir secara logis, kreatif dan reflektif.
2. Sabar, teliti, dan penuh kehati-hatian

3. Memiliki pengalaman atas wisata yang akan di selenggarakan.
4. Mengetahui kondisi yang sebenarnya atas komponen yang terlibat dalam wisata.
5. Memiliki visi dan imajinasi yang kuat.
6. Memiliki pengetahuan yang luas, baik produk maupun teknik perencanaan.

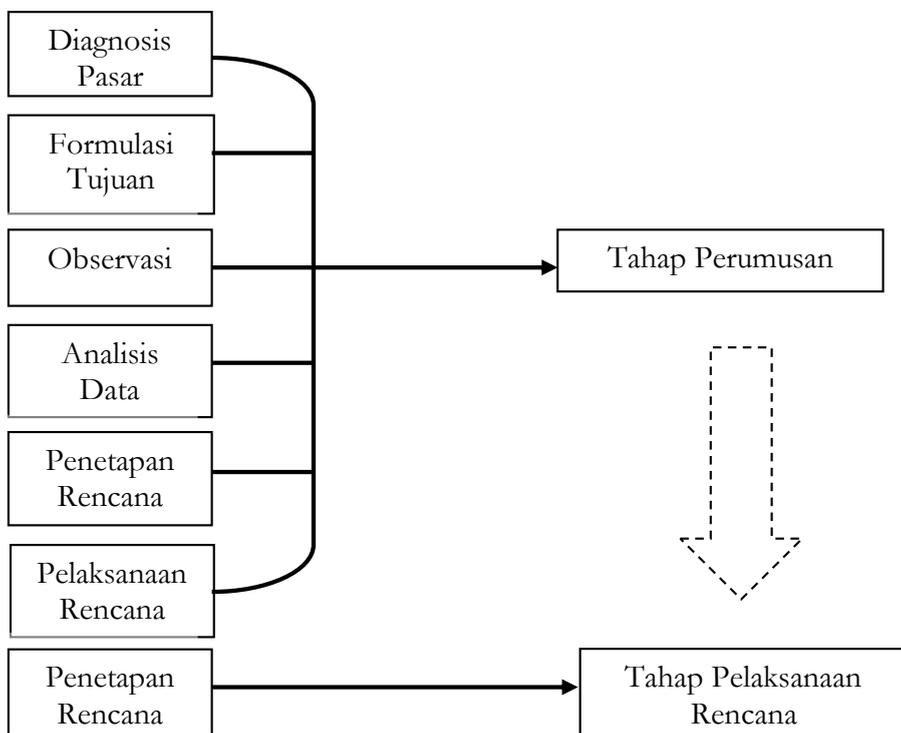
D. Tahapan dalam Perencanaan Wisata

Sebagaimana pengertian perencanaan wisata dan aspek-aspek yang berhubungan di atas, maka perencanaan wisata hendaknya didasari pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan didukung oleh data yang mendukung dan akurat. Untuk itu dalam melakukan dan mewujudkan perencanaan wisata, tahapan-tahapan perencanaan wisata yang perlu dipahami dan dilakukan sebagai berikut:



Gambar 19. Tahapan dalam Perencanaan Wisata

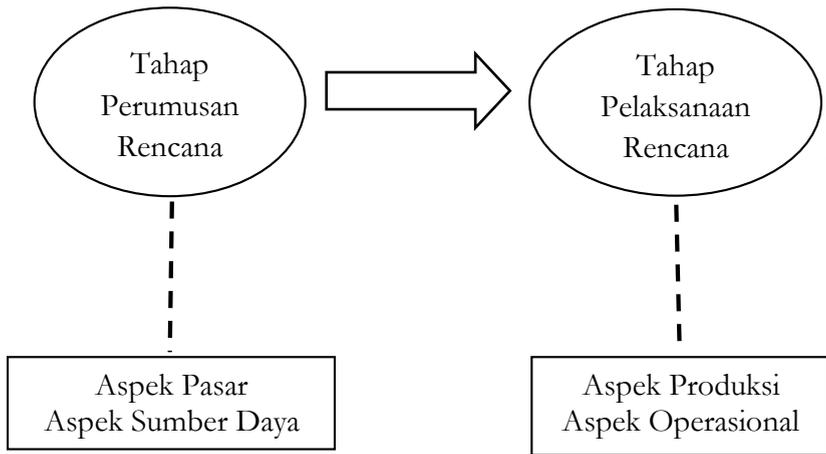
1. Diagnosis Pasar, pada hakikatnya dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pasar dengan melihat gejala-gejala yang muncul, karena karakteristik penyusunan produk wisata harus *consumer oriented*.
2. Formulasi tujuan, informasi yang dihasilkan dari diagnosis pasar selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk merumuskan tujuan. Rumusan tujuan merupakan hipotesis akan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan tak lain rumusan wisata yang akan diselenggarakan. Tujuan yang dirumuskan itu harus dapat menjawab pertanyaan yang dikenal secara umum dengan rumusan 5W1H, yaitu: *What* (apa), wisata apa yang akan disusun? *Why* (mengapa) mengapa wisata disusun? *Who* (siapa), siapa saja yang akan terlibat dalam wisata tersebut? *When* (Kapan), kapan wisata tersebut diselenggarakan? *Where* (dimana), di mana wisata itu diselenggarakan? dan *How* (bagaimana), bagaimana wisata itu diselenggarakan?
3. Observasi, merupakan implementasi ujian yang telah dirumuskan, dan menghubungkan antara hipotesis dan kenyataan yang ada di lapangan. Hal-hal yang diobservasi meliputi seluruh masalah yang dipertanyakan dalam rumusan tujuan. Selengkapnya mengenai Instrumen yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan tahapan perencanaan wisata, sebagai berikut:



Gambar 20. Tahapan Perencanaan Wisata

4. Analisis Data, data yang telah diperoleh dalam kegiatan observasi diolah dan dianalisis. Analisis data bertujuan untuk menentukan strategi pencapaian tujuan, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan, dan mencari alternatif-alternatif yang mungkin dapat ditempuh.
5. Penetapan Rencana, hasil analisis yang telah diperoleh selanjutnya dipakai sebagai dasar melakukan revisi. Perbaiki dan olahan ini yang pada akhirnya menghasilkan rencana yang akan dilaksanakan.
6. Pelaksanaan Rencana, merupakan tahap akhir dalam perencanaan wisata. Pelaksanaan rencana adalah kegiatan nyata dalam mengawali dan memantau pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya, keenam tahapan tersebut jika diklasifikasikan akan tampak seperti Gambar 21. Tahap perencanaan wisata harus mengacu pada aspek-aspek yang direncanakan. Keterkaitan antara keduanya dapat diilustrasikan seperti Gambar 21 berikut:



Gambar 21. Hubungan antara Aspek-aspek Wisata dengan Tahapan dalam Perencanaan Wisata

Aspek pasar dan sumber daya merupakan dasar bagi pencapaian tujuan. Dua komponen inilah yang di olah sejak awal, yang selanjutnya dikombinasikan sebagai dasar penciptaan produk, untuk merencanakan langkah-langkah operasional yang akan di tempuh.

E. Instrumen Observasi Atraksi dan Fasilitas Wisata

Dalam observasi atraksi dan fasilitas wisata, contoh bentuk instrumen yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Atraksi Wisata

Instrumen ini di gunakan untuk menginventarisir objek dan atraksi wisata, dan bentuk-bentuk hiburan yang dipakai sebagai komponen dalam penyelenggaraan wisata (Tabel 2):

Tabel 2. Inventarisasi Atraksi Wisata

Disiapkan untuk : (1)

Durasi : (2)

No	Nama	Ciri	Uraian	D/N	E.t.c	Tiket	Donasi	Ket.
.	Objek/antraksi	khas	singkat			masuk		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Di inventarisir oleh:

Keterangan:

- (1) Nama *tur* atau *group*
- (2) Waktu yang diperlukan untuk penyelenggaraan wisata tersebut.
- (3) Nomor urut
- (4) Nama atraksi wisata atau hiburan.
- (5) Ciri-ciri khusus atraksi wisata
- (6) Penjelasan atraksi wisata atau hiburan secara singkat
- (7) Waktu kunjungan yang dapat dilakukan: siang dari (*D/day*) atau malam hari (*N/Night*) atau bisa kedua-duanya
- (8) Perkiraan waktu yang diperlukan untuk kunjungan
- (9) Biaya masuk yang dikenakan per orang
- (10) Sumbangan sukarela atau ditentukan, dihitung per group
- (11) Keterangan diisi hal-hal khusus yang menjadi perhatian, juga dapat digunakan untuk memberi tanda dipakai atau tidaknya atraksi wisata atau hiburan tersebut dalam program.

Sumber: Suyitno (2001)

2. Inventarisasi fasilitas wisata

Instrumen ini digunakan untuk untuk menginventarisir fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan wisata, seperti sarana transportasi, akomodasi, dan restoran (Tabel 3):

Tabel 3. Inventarisasi Fasilitas Wisata

Disiapkan untuk: (1)

Durasi : (2)

Jumlah peserta : (3)

Tanggal : (4)

No.	Nama Fasilitas	Jarak (km)	Dari (kota)	Fasilitas	Kapasitas	Tarif	Ket.
	Transportasi:						
(5)(6)....	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						
	Akomodasi:						
						
	Restoran:						
						

Di inventarisir oleh:

Keterangan:

- (1) Nama tur atau group
- (2) Jumlah peserta
- (3) Lama penyelenggaraan
- (4) Tanggal penyelenggaraan
- (5) Nomor urut

- (6) Nama masing-masing fasilitas
- (7) Jarak yang dinyatakan dalam kilometer
- (8) Nama kota atau tempat tertentu sebagai patokan jarak, biasanya adalah hotel tempat menginap atau pusat kota
- (9) Fasilitas yang dimiliki
- (10) Kapasitas atau daya tampung (tempat duduk atau jumlah kamar)
- (11) Harga
- (12) Keterangan diisi hal-hal khusus yang menjadi perhatian, juga digunakan untuk memberi tanda dipakai atau tidaknya fasilitas tersebut dalam program.

Sumber: Suyitno (2001)

BAB VI

EKOWISATA

Pariwisata telah berkembang menjadi sektor yang besar dan diandalkan karena memiliki keterkaitan yang luas dengan akomodasi, restoran, biro perjalanan maupun transportasi. Namun, perkembangan yang cukup pesat di sektor pariwisata dalam beberapa dekade terakhir seringkali menimbulkan kritik yang cukup tajam akibat dampak negatif yang ditimbulkan baik dari aspek ekologis, sosial ekonomi dan budaya. Penyebab hal tersebut karena pariwisata (biasa disebut pariwisata konvensional) yang berkembang lebih bersifat massal, tidak ramah lingkungan dan mengabaikan keberadaan dan partisipasi masyarakat lokal. Dampak yang ditimbulkan terkait aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek Ekologi

Pariwisata konvensional mengakibatkan perubahan setting lokasi wisata (*landscape*), ekosistem maupun menurunnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini disebabkan oleh karakter pariwisata konvensional yang fokus pada keuntungan ekonomi.

Peningkatan jumlah wisatawan yang datang berarti peningkatan keuntungan ekonomi yang di terima. Hal ini mendorong pembangunan fasilitas yang wisata yang disesuaikan dengan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan walaupun terkadang tidak ramah lingkungan dan mengabaikan keberadaan penduduk lokal.

2. Aspek Ekonomi

Pariwisata sebagai sumber devisa negara yang memiliki keuntungan besar merupakan pertimbangan utama pengembangan wisata di negara-negara berkembang. Namun demikian, keuntungan ekonomis yang diharapkan tidak dapat di terima secara optimal. Hal ini di sebabkan oleh banyak fasilitas/barang dan infrastruktur yang dibutuhkan dari perkembangan wisatawan harus di impor dari negara maju seperti bahan makanan, *escalator*, *lift* dan sebagainya. Secara makro keuntungan ekonomi yang diterima hanya semu, karena penerimaan dalam bentuk valuta asing jauh lebih sedikit dari yang dibelanjakan ke luar negeri untuk pembelian fasilitas dan barang tersebut. Selain itu terjadi peningkatan inflasi di lokasi wisata yang di sebabkan karena pelaku bisnis menetapkan harga yang sama untuk wisatawan asing dan penduduk lokal yang berimplikasi pada peningkatan biaya hidup penduduk lokal dan makin lama akan memarjinalkan mereka.

3. Aspek Sosial Budaya

Pariwisata menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan hidup masyarakat yang berdampak pada marjinalisasi penduduk. Selain itu, terjadi infiltrasi budaya asing yang menjadi gangguan budaya lokal karena budaya tersebut yang masuk terkadang tidak sesuai dengan budaya setempat seperti gaya hidup yang sangat berbeda (penggunaan alkohol dan narkoba serta seks bebas).

Berdasarkan dengan kondisi di atas, membuat keinginan pihak-pihak yang peduli lingkungan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan yang dapat memenuhi tuntutan ekologis,

ekonomis dan sosial budaya yang memberi manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat lokal.

A. Ekowisata Sebagai bentuk Pariwisata Berkelanjutan.

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan kegiatan wisata yang mempertemukan kegiatan pengunjung dan penerima dengan menjaga kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat pula ikut menikmati wisata itu kelak. Untuk itu diperlukan sebuah pengelolaan tertentu atas lingkungan dan sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi kepentingan ekonomi, sosial dan estetika dan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologis yang penting, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan.

Pembangunan wisata yang berkelanjutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sosial ekologis berkelanjutan

Pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.

2. Secara sosial dapat diterima

Mengacu kepada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan pariwisata) tanpa menimbulkan konflik sosial.

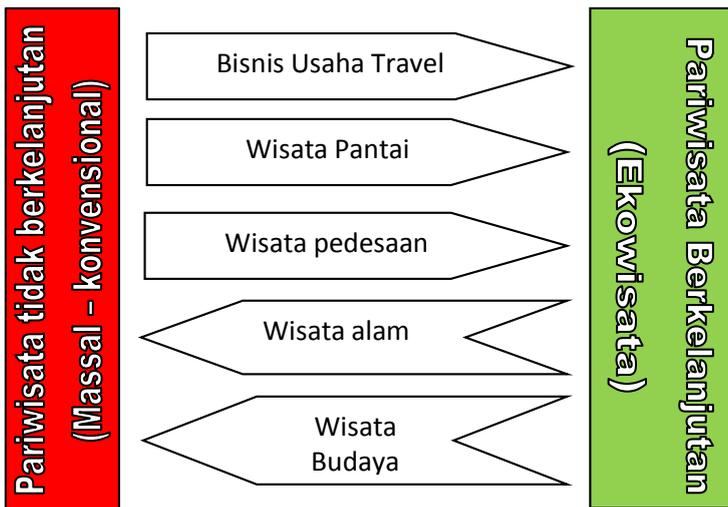
3. Secara kebudayaan dapat diterima

Penduduk lokal mampu beradaptasi dengan budaya turis yang cukup berbeda (*tourist culture*).

4. Secara ekonomi menguntungkan

Keuntungan ekonomi yang didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa kriteria diatas, kemudian jenis wisata yang berkembang lebih lanjut disebut ekowisata. Ekowisata merupakan suatu perjalanan yang bertanggungjawab terhadap alam yang berpotensi dalam melindungi dan melestarikan lingkungan, mendukung dan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata benar-benar menarik oleh para wisatawan dalam beberapa dekade terakhir karena mereka dapat belajar tentang lingkungan, budaya, dan berkontribusi pada konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, dan tujuan pembangunan ekonomi di daerah tujuan, daripada hanya bersenang-senang. Selain itu, ini dapat mendukung untuk realisasi Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). Untuk lebih jelas tentang posisi ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 22 berikut:



Gambar 22. Ekowisata sebagai bagian dari Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Ekowisata pertama kali muncul pada akhir 1980-an sebagai reaksi terhadap banyaknya terjadi permasalahan lingkungan akibat kegiatan wisata yang tidak bertanggungjawab yang mengabaikan kelestarian dan keberlanjutan dari alam dan lingkungan. Perkembangan ekowisata merupakan tuntutan lebih dari pencinta lingkungan bahwa kegiatan wisata seharusnya tidak hanya memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan tetapi harus pula melibatkan kegiatan konservasi.

B. Manfaat Pengembangan Ekowisata

Pengembangan Ekowisata akan memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Ekowisata dapat memberikan perlindungan dan pelestarian habitat termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya.
2. Ekowisata dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan kesadaran wisatawan dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap alam, termasuk mengenai pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Pengembangan ekowisata memberikan keuntungan dari segi ekonomi karena tidak membutuhkan sarana dan modal/investasi yang besar sebagaimana pariwisata konvensional.
4. Ekowisata dapat memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui kunjungan wisatawan. Selain itu, juga dapat memberikan pemasukan pendanaan untuk biaya konservasi yang merupakan salah satu dari prinsip dasar pengembangan kawasan ekowisata
5. Dengan mengutamakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ekowisata, hal ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberi keuntungan ekonomi bagi mereka. Selain itu, penyediaan

sarana akomodasi dan pangan seperti *homestay* dan warung makan di sekitar kawasan ekowisata oleh masyarakat, juga dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

6. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal yang dimiliki akan semakin terjaga, lestari dan dikenal.

C. Prinsip Pengembangan Ekowisata

Obyek wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang menarik memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan ekowisata. Secara khusus pengembangan ekowisata memiliki beberapa prinsip yang mesti dipenuhi, yaitu:

1. Kegiatan wisata yang memberikan dampak negatif paling minimum pada lingkungan
2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik bagi pengunjung maupun penduduk lokal pada ekosistem dan budaya setempat.
3. Semua elemen kegiatan ekowisata mempunyai kontribusi langsung terhadap kegiatan konservasi.
4. Memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan wisata.
5. Ekowisata dapat memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal.
6. Berfungsi sebagai lahan untuk pendidikan dan penelitian penduduk lokal maupun pengunjung

D. Kendala Pengembangan Ekowisata.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni kendala struktural, kendala eksternal, dan kendala internal.

1. Kendala Struktural

Kendala struktural merupakan kendala yang berhubungan dengan kelembagaan (pemahaman aparat tentang konsep dan definisi ekowisata serta koordinasi antar instansi), kebijakan serta regulasi internasional. Kendala struktural yang paling dominan adalah adanya tumpang tindih antara aturan/kebijakan yang berkaitan dengan peraturan pariwisata terutama ekowisata dan pengelolaannya antar kementerian terkait seperti pariwisata, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan prasarana wilayah, termasuk dengan aturan yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada era otonomi ini, dimana pemerintah daerah merasa memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri.

2. Kendala Internal

Kendala internal meliputi sumber daya manusia seperti pengetahuan operator pariwisata tentang pelestarian lingkungan dan partisipasi penduduk lokal dalam pengelolaan ekowisata, kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi objek wisata untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata. Dari sisi sumberdaya manusia, kendala yang paling mendasar adalah pemahaman akan konsep ekowisata yang dimiliki oleh *stakeholders* yang masih terbatas dan bervariasi. Kendala internal lainnya yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yang bergerak di sektor wisata, antara lain pemandu wisata dan pekerja biro perjalanan. Kendala lainnya adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata yang masih terbatas.

3. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang mempengaruhi perkembangan ekowisata antara lain yang berasal dari luar elemen kepariwisataan, seperti kondisi keamanan, politik, dan kualitas perilaku pengunjung yang terkait dengan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

E. Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, diperlukan adanya pengelolaan secara terpadu. Pengelolaan ini melibatkan adanya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan *stakeholders*, seperti, pemerintah masyarakat lokal, pelaku bisnis, peneliti/akdemisi, wisatawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan secara fisik adalah ketersediaan sarana pendukung dan aksesibilitas di lokasi wisata. Perencanaan yang terpadu merupakan *master plan* untuk membangun *eco-destination* ekowisata. Master plan harus berisi kerangka kerja, *stakeholders* yang terkait (lokal, regional, nasional) dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* untuk kegiatan konservasi lingkungan, peningkatan ekonomi lokal dan apresiasi budaya lokal. Beberapa karakteristik dari *eco-destination* sebagai berikut:

1. Keaslian alam terpelihara dengan pemanfaatan yang terjaga.
2. Pembangunan *landscape* tidak mendominasi
3. Pemanfaatan bisnis lokal dalam skala kecil, termasuk warung makan dan kerajinan tangan

4. Pembuatan zonasi untuk kegiatan rekreasi seperti jalur untuk sepeda, pejalan kaki untuk dimanfaatkan oleh penduduk lokal maupun wisatawan.
5. Interaksi bersahabat antara pengunjung dan penduduk lokal di lokasi wisata.
6. Pembuatan fasilitas publik yang bersih dan terjaga baik fasilitas Mandi-Cuci-Kakus (MCK) yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal maupun wisatawan.

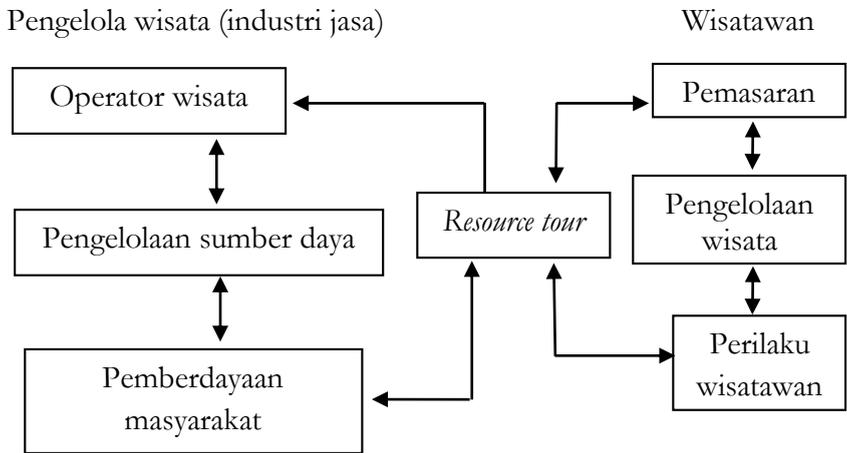
Tanggung jawab masing-masing *stakeholders* bervariasi, pemerintah bertanggung jawab dalam koordinasi pembuatan perencanaan, pembuatan kebijakan-kebijakan peraturan, zonasi dan pembangunan lokasi wisata tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan sarana telekomunikasi, sarana air bersih dan sistem pembuangan sampah.

Dari aspek ekologi, perencanaan pengukuran daya dukung lingkungan sangat penting sebelum lokasi dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Daya dukung lingkungan akan merepresentasikan kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekowisata seperti penyediaan air bersih, penataan lahan dan keanekaragaman yang hayati yang dimiliki daerah ekowisata.

Dari aspek ekonomi, suatu perencanaan pengembangan ekowisata harus memasukkan perhitungan biaya dan manfaat dari pengembangan ekowisata. Dalam perhitungan biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) tidak hanya dijelaskan keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh pihak terkait namun juga biaya yang harus ditanggung seperti biaya konservasi atau preservasi lingkungan.

Dari aspek sosial budaya, perencanaan harus memasukkan kondisi sosial budaya lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ini serta kemungkinan dampak negatif yang akan diterima serta cara mengatasinya.

Keberhasilan ekowisata tergantung sejauh mana keberhasilan dalam mengantisipasi dan menangani terhadap faktor internal, eksternal, dan struktural yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam mengembangkan ekowisata selain dibutuhkan sebuah perencanaan terpadu juga perlu diperhatikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sinergi antara pengelola wisata dan wisatawan sangat dibutuhkan (Gambar 23). Sisi pengelola wisata yakni operator wisata, pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sisi wisatawan meliputi pemasaran, pengelolaan wisatawan dan perilaku wisatawan.



Gambar 23. Kerangka Kerja Ekowisata

Beberapa tugas dan tanggungjawab dari operator wisata dalam pelaksanaan ekowisata, sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi sebelum perjalanan berkaitan dengan budaya dan lingkungan lokasi ekowisata.
2. Melakukan *Briefing* yang mendalam saat kedatangan termasuk informasi tentang kondisi geografis, sosial, politik dan beberapa kendala atau tantangannya
3. Menyediakan lokal *guide* terlatih, memberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan penduduk lokal, membangun pengertian atas kehidupan sehari-hari dan

tradisi penduduk lokal dan berbagai isu yang cocok untuk didiskusikan dalam interaksi dengan penduduk lokal.

4. Membuka kesempatan bagi *Non Government Organization (NGO)* yang ingin berpartisipasi, mengatur agar semua tiket masuk harus dibayar penuh, dan menyediakan akomodasi yang ramah lingkungan.

Operator wisata juga memastikan bahwa ada kegiatan konservasi baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh *stakeholders* seperti wisatawan dan pemerintah. Operator wisata dapat berasal dari swasta, LSM, dan masyarakat lokal.

Sesuai dengan karakteristiknya, operator wisata selain berfungsi sebagai pemandu wisata yang menyediakan informasi yang dibutuhkan juga mempersiapkan akomodasi yang ramah lingkungan (*eco-lodge*) bagi wisatawan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya di lokasi ekowisata. Akomodasi yang ramah lingkungan dianggap merefleksikan inisiatif lokal dalam menerapkan desain lokal dan pemakaian bahan lokal. Akomodasi khusus yang dibangun ini mampu menghindari tekanan yang lebih banyak bagi lingkungan dan relatif lebih mudah perawatannya. Selain itu, wisatawan akan lebih terkesan dengan suasana eksotik yang muncul dari akomodasi semacam ini. Beberapa karakteristik *eco-lodge* sebagai berikut:

1. Melindungi lingkungan alam dan budaya
2. Memperkecil dampak negatif dalam pembangunannya
3. Dibangun sesuai dengan budaya lokal seperti bentuk dan warna
4. Menggunakan air dengan efisien
5. Memiliki penanganan limbah
6. Memakai energi yang ramah lingkungan
7. Membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berinteraksi

8. Menawarkan program pendidikan bagi operator, wisatawan maupun penduduk lokal tentang lingkungan alam dan budaya
9. Berkontribusi pada pembangunan lokal yang berkelanjutan melalui program riset.

Selain itu salah satu faktor penting yang termasuk dalam pengelolaan lain adalah upaya pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial budaya setempat.

BAB VII

HUTAN MANGROVE DAN PEMANFAATAN SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

A. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan hutan yang menempati kawasan pantai dan sekitar muara sungai dan utamanya ditumbuhi oleh vegetasi mangrove yang dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut.

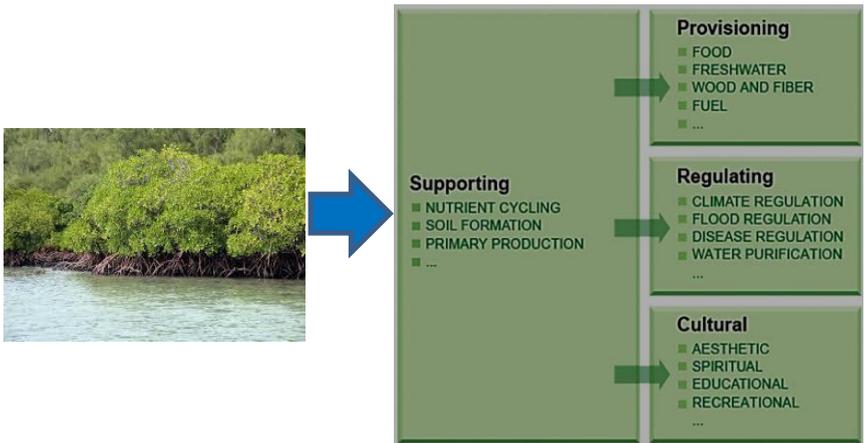
Hutan ini mangrove merupakan salah satu ekosistem pantai yang produktif dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui layanan ekosistem (*ecosystem services*) yang dimiliki.

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat baik secara fisik, biologi dan ekonomi. Secara fisik, fungsi, manfaat dan layanan ekosistem hutan mangrove meliputi perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut, perangkap sedimen dan *recycling* nutrien. Secara biologi, hutan mangrove memberikan layanan terhadap kestabilan ekosistem, sumber nutrien, dan sebagai area memijah, mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut (seperti ikan, kepiting

dan udang). Secara ekonomi, hutan mangrove memberikan layanan sebagai area pengembangan budidaya, perikanan, rekreasi, ekowisata, penghasil kayu dan daun nipah yang dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Mangrove dapat menghasilkan bahan-bahan material untuk rumah tangga dan industri seperti kayu bakar, arang, dan kertas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Millennium Ecosystem Assessment (MA) pada tahun 2005 mengategorikan empat jenis layanan ekosistem yang diberikan oleh hutan mangrove (Gambar 24), yaitu:

1. *Provisioning services*, seperti penyediaan produk kayu bakar, arang, daun nipah, makanan (buah mangrove), obat-obatan, ikan, udang dan kepiting.
2. *Regulating services*, seperti penahan gelombang, pencegahan dan pengontrolan erosi pantai (abrasi pantai), intrusi air laut, banjir, dan penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim
3. *Cultural services*, seperti layanan estetik, spiritual, rekreasi, pendidikan dan penelitian, dan ekowisata.
4. *Supporting services*, seperti siklus nutrien dan produktifitas primer.



Gambar 24. Layanan Ekosistem Hutan Mangrove
 Sumber: Millennium Ecosystem Assessment/MA (2005)

Dalam nilai ekonomi, layanan ekosistem yang di berikan oleh hutan mangrove ini di perkirakan rata-rata mencapai US\$ 4,185 per hektar per tahun, meskipun dalam variasi spasial dan temporal yang substansial dalam nilai ini bisa berbeda.

B. Sebaran dan Luasan Hutan Mangrove

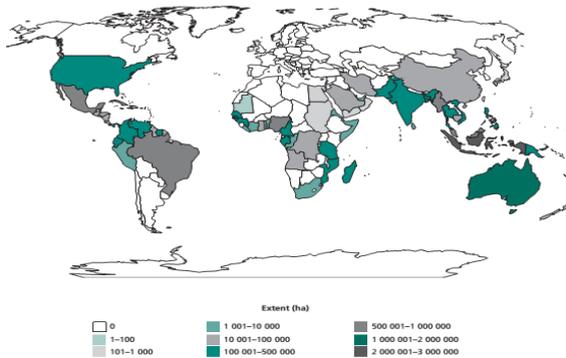
Hutan mangrove di dunia banyak ditemui di kawasan pesisir negara-negara tropik dan subtropik yang secara geografis terdistribusi pada garis lintang antara 30° LU dan 30°LS. Keterbatasan distribusi geografis ini erat kaitannya karena pengaruh iklim yang tidak sesuai dengan pertumbuhan mangrove, seperti pada kawasan yang memiliki suhu yang sangat dingin. Selain itu, rendahnya curah hujan dan ketersediaan air juga sangat berperan dalam menghambat pertumbuhan mangrove.



Gambar 25. Distribusi Kawasan Mangrove Dunia

Sumber: UNEP World Conservation Monitoring Centre and International Society for Mangrove Ecosystems. Map Copyright: National Geographic Magazine.

Secara global, luasan dan distribusi hutan mangrove telah dilansir oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Food Agricultural Organization (FAO) pada tahun 2007 dan beberapa penulis seperti Alongi pada tahun 2008, Spalding dkk. tahun 2010, dan Giri dkk. tahun 2011.



Gambar 26. Luasan dan Distribusi Kawasan Mangrove Dunia
 Sumber: FAO, 2007

Beberapa laporan ini menyajikan hasil yang berbeda-beda namun luasannya berkisar antara 13,7 - 15,2 juta hektar yang tersebar di 118 - 124 negara yang meliputi Asia (38 %), Afrika (21 %) Amerika Utara dan Tengah (15%), Oceania (13 %) dan Amerika Selatan (13 %) (Gambar 26).

Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang sejak tahun 2012 berubah nama menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial), luasan kawasan mangrove mencapai 3.2 juta hektar pada tahun 2009.



Gambar 27. Persebaran Kawasan Mangrove di Indonesia
 Sumber: NASA and the US Geological Survey (2010).

Tabel 4. Lima belas negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia

No	Negara	Luasan (Ha)	% dari luasan secara global	Region
1	Indonesia	3,112,989	22.6	Asia
2	Australia	977,975	7.1	Oceania
3	Brazil	962,683	7.0	Amerika Selatan
4	Meksiko	741,917	5.4	Amerika Utara dan Tengah
5	Nigeria	653,669	4.7	Afrika
6	Malaysia	505,386	3.7	Asia
7	Myanmar	494,584	3.6	Asia
8	Papue New Guinea	480,121	3.5	Oceania
9	Bangladesh	436,570	3.2	Asia
10	Kuba	421,538	3.1	Amerika Utara dan Tengah
11	India	368,276	2.7	Asia
12	Guinea Bissau	338,652	2.5	Afrika
13	Mozambik	318,851	2.3	Afrika
14	Madagaskar	278,078	2.0	Afrika
15	Filipina	263,137	1.9	Asia

Sumber: Giri dkk. (2011)

Sebagian besar kawasan mangrove tersebar di Propinsi Papua dan Papua Barat (50.37%) dan diikuti oleh propinsi Kalimantan Timur (11.23%), Riau (6.36%) dan Sumatera Selatan dan

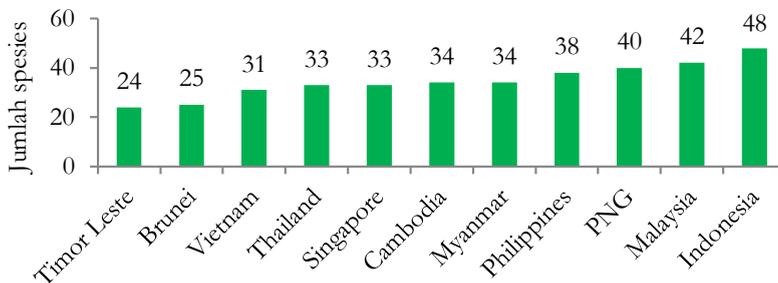
Kalimantan Barat masing-masing sebesar (4.6%). Luasan kawasan mangrove di Indonesia merupakan yang terluas di dunia dan memberikan kontribusi terbesar (22.6 %) dari luasan kawasan mangrove secara global, diikuti oleh Australia (7.1%), Brazil (7.0%), dan Meksiko (5.4%) (Tabel 4).

C. Keragaman Flora dan Fauna Hutan Mangrove

1. Flora Hutan Mangrove

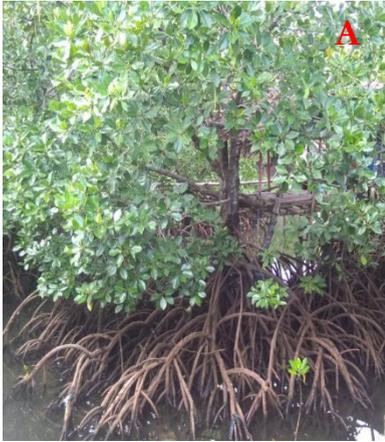
Keragaman flora yang menghuni hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 202 spesies, yang terdiri dari 89 spesies pohon, 5 spesies palma, 19 spesies pemanjat, 44 spesies herba, 44 spesies epifit, dan 1 spesies paku. Dari 202 spesies tersebut, 48 spesies di antaranya merupakan mangrove sejati (*true mangrove*), dan sisanya adalah mangrove ikutan (*associate mangrove*).

Jumlah spesies mangrove sejati yang ditemukan di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di dunia (jumlah spesies mangrove dunia 60 spesies), diikuti oleh Malaysia 42 spesies, Papua New Guinea (PNG) 40 spesies, dan Filipina 38 spesies. Dari 48 spesies tersebut, yang umum di jumpai di kawasan mangrove Indonesia yakni *Avicennia* sp., *Sonneratia* sp., *Rhizophora* sp., *Bruguiera* sp., *Ceriops* sp., *Xylocarpus* sp., dan *Excoecaria* sp. Namun spesies yang mendominasi adalah *Rhizophora* sp.



Gambar 28. Distribusi mangrove sejati di negara-negara Asia Tenggara dan Oceania.

Sumber: Giesen dkk. (2007)



Gambar 29. Spesies mangrove *Rhizophora mucronata* (A) dan *Sonneratia alba* (B).
Sumber: Malik dkk. (2018)

2. Fauna Hutan Mangrove

Kawasan hutan mangrove merupakan habitat bagi berbagai fauna, baik fauna yang hidup di perairan maupun di daratan. Fauna perairan/akuatik terdiri atas organisme yang menghuni kolom perairan, seperti ikan dan udang, dan organisme yang menempati substrat, baik yang keras (akar dan batang pohon mangrove) maupun yang lunak (berlumpur), seperti kerang, kepiting, dan dari jenis avertebrata lainnya. Selain itu, hutan mangrove juga banyak dihuni oleh fauna reptil, burung dan mamalia.

a. Moluska

Jenis moluska (hewan bertubuh lunak) ditemukan kurang lebih 74 spesies di hutan mangrove Sulawesi Selatan dan 40 spesies di Halmaherah, Maluku Utara. Di antara spesies moluska tersebut: *Telescopium telescopium* (Siput tanduk), *Terebralia palustris* (Siput air payau), *Batillaria zonalis* (Siput pantai kecil berpasir), *Cerithidea obtusa* (Siput laur), *Anodontia edentula* (Kerang lumpur), dan *Asaphis deflorata* (remis).

b. Kepiting

Kepiting merupakan hewan yang melimpah di kawasan hutan mangrove, dimana kepadatannya bisa mencapai 10 hingga 70 per meter persegi. Kepiting yang menghuni kawasan mangrove Indonesia atau bisa dikenal kepiting bakau terdiri dari beberapa spesies, di antaranya *Scylla olivacea* (Kepiting Bakau Merah), *Scylla serrata* (Kepiting Bakau Hijau atau bisa dikenal dengan nama *Giant Mud Crab* = Kepiting Bakau Raksasa), *Scylla tranquebarica* (Kepiting Bakau Ungu), dan *Scylla paramamosain* (Kepiting Bakau Putih). Namun, *Scylla serrata* (*Giant Mud Crab*) merupakan spesies komersial yang penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara Asia Tenggara lainnya.

c. Udang

Kawasan mangrove merupakan habitat yang penting bagi banyak spesies Krustasea (udang-udangan) dan memiliki nilai komersial penting. Di Indonesia, seperti di Sulawesi Selatan ditemukan ada 14 spesies terdiri dari genus *Macrobrachium* (8 spesies), *Metapeneus* (2 spesies) dan *Palaemonetes* (2 spesies). Di kawasan mangrove Pulau Pari, di Kepulauan Seribu, Jakarta tercatat ada 28 spesies, dan di kawasan mangrove Tanjung Bungin, Sumatera Selatan lebih besar lagi yakni 34 spesies.

d. Ikan

Banyak dari spesies ikan menjadikan kawasan mangrove sebagai habitat penting bagi perkembang biakan dan asuhan (*breeding and nursery ground*) termasuk ikan-ikan yang memiliki nilai komersial.

Di Malaysia tercatat kurang lebih 119 spesies ikan ditemukan di kawasan mangrove di negara bagian Selangor. Di perairan mangrove Trinity, Queensland Utara, Australia ditemukan 55 spesies, dan di Paglibao, Filipina mencapai 128 spesies. Di Indonesia, di kawasan mangrove taman nasional Ujung Kulon dan Pulau Panaitan

tercatat 62 spesies. Pada dua kawasan ini, spesies ikan yang mendominasi yakni *Mugil cephalus* (ikan Belanak), *Caranx kalla* (ikan Selar), *Holocentrum rubrum* (ikan mas laut), *Lutjanus fulviflamma* (ikan Kakap Dory), *Plotosus canius* (ikan Lele Eeltail), dan *Toxotes jaculator* (ikan Sumpit). Di kawasan mangrove lainnya di Indonesia, seperti di Kawasan mangrove Tongke-tongke, Kabupaten Sinjai dan di Sungai Lamuru, kawasan mangrove Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan masing-masing di temukan sebanyak 27 dan 17 spesies ikan. Spesies ikan terbesar ditemukan dari famili Mullidae, dengan spesies ikan yang memiliki nilai komersil tinggi yakni *Lates calcarifer* (ikan Barramundi), *Siganus guttatus* (ikan Baronang Totol), dan *Siganus vermiculatus* (ikan Baronang Batik).

e. Reptil

Fauna reptil yang biasanya ditemukan di hutan mangrove yakni *Crocodylus porosus* (Buaya muara), *Varanus salvator* (Biawak air tawar), *Enhydryn enhydryn* (Ular air pelangi), *Fordonia leucobalia* (Ular Air Bakau), *Boiga dendrophila* (Ular cincin-emas), *Acrochordus granulatus* (Ular kadut), *Cerberus rhynchop* (Ular Bockadam emas), dan *Trimeresurus purpureomaculatus* (Ular viper bakau). Spesies-spesies tersebut di atas ditemukan juga di ekosistem air tawar atau lahan kering yang berdekatan.

f. Burung

Burung-burung yang ditemukan di hutan mangrove banyak yang memiliki kesamaan dengan burung yang terdapat di hutan tropis lainnya. Selain sebagai habitat bagi beberapa spesies burung, hutan mangrove menjadi tempat persinggahan bagi burung saat melakukan migrasi musiman, di mana mereka menjadikan mangrove sebagai tempat bertengger saat air pasang dan sebagai tempat berteduh dan mencari makan.

Wetlands International-Indonesia Program mencatat total lebih dari 200 spesies burung yang hidup di habitat hutan mangrove

Indonesia, yang merupakan 13 persen dari total spesies burung di Indonesia. Jumlah spesies ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan di kawasan Mangrove Kedah, Malaysia yang totalnya hanya 48 – 78 spesies. Spesies burung utama yang menghuni hutan mangrove yakni *Butorides striatus* (Kokokan Laut), *Heliopais personata* (Pedendang topeng), *Alcedo atthis* (Raja-udang erasia), *Pelargopsis amauropterus* (Burung pekakak bersayap coklat), *Halcyon coromanda* (Cekakak merah), *Todirhamphus (Halcyon) chloris* (Cekakak sungai), *Pitta megarhyncha* (Paok bakau), *Dicrurus leucophaeus* (Srigunting kelabu), *Gerygone sulphurea* (Remetuk Laut), *Orthotomus ruficeps* (Cinenen kelabu), *Cyornis rufigastra* (Sikatan Bakau), *Rhipidura javanica* (Kipasan belang), *Pachycephala grisola* (Kancilan Bakau), *Anthreptes malacensis* (Burung-madu kelapa), dan *Nectarinia calcostetha* (Burung madu-bakau).



Gambar 30. Spesies burung yang hidup di kawasan hutan mangrove: (A) *Butorides striatus* (Kokokan Laut). (B) *Cyornis rufigastra* (Sikatan Bakau).

Sumber: (A) Prabekti Y (2012) <https://www.flickr.com/photos/45546341@N05/8146503221>. (B) <https://worldbirdsblog.wordpress.com/mangrove-blue-flycatcher-cyornis-rufigastra/>

g. Mamalia

Beberapa mamalia yang ditemukan di hutan mangrove di Asia Tenggara termasuk Indonesia termasuk spesies *Sus scrofa* (Babi hutan/celeng), *Cervus unicolor* (Rusa sambar), *Tragulus javanicus* (Pelanduk Jawa), *Muntiacus muntjak* (Kijang biasa), *Tapirus malayanus* (Tapir), *Pteropus* (Kalong), *Lutra perspicillata* (Berang-berang), *Trachypithecus aurata* (Lutung budeng) dan fauna endemik *Nasalis*

larvatus (Bekantan) yang hidup di hutan mangrove Tarakan, Kalimantan Timur. Monyet dari spesies *Macaca fascicularis* (Monyet ekor panjang) umum ditemukan di hutan mangrove dan di sepanjang sungai pada saat air surut di kawasan mangrove Vietnam, Myanmar, Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sedangkan di Sulawesi Selatan, salah satu monyet endemik (*Macaca orbreata*) biasa di jumpai di hutan mangrove di Malili, Kabupaten Luwu Timur dan di daerah Teluk Bone, Kabupaten Bone. Selain itu, spesies *Panthera tigris sumatranus* (Harimau Sumatera) ditemukan di kawasan mangrove Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan, namun jumlah spesies harimau ini semakin menurun dan langka.



Gambar 31. *Nasalis larvatus* (Bekantan) fauna yang hidup di hutan mangrove Tarakan, Kalimantan Timur.

Sumber: <https://gpswisataindonesia.wordpress.com/2015/02/12/hutan-mangrove-tarakan-kalimantan-timur/>

D. Degradasi dan Deforestasi Hutan Mangrove

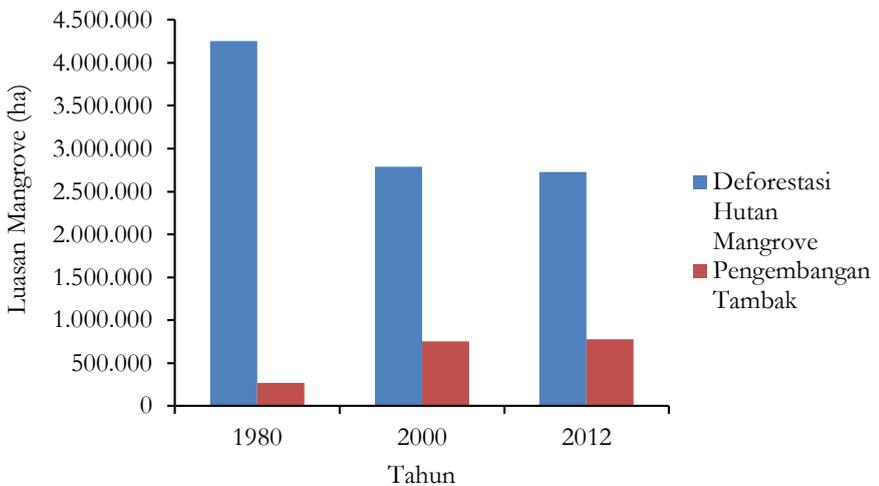
Pemanfaatan hutan mangrove di Indonesia telah dikenal dan dilakukan secara tradisional selama berabad-abad dan bergenerasi untuk tujuan kebutuhan domestik seperti penebangan kayu dan

pengembangan akuakultur. Namun, sejak awal 1970-an histori penebangan komersial dalam skala besar dari eksploitasi kayu mangrove dilakukan guna memproduksi kayu bulat, arang, dan *chip* untuk bahan kertas, khususnya di Kalimantan dan Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, eksploitasi mangrove secara komersial telah mulai dilakukan untuk memasok pabrik kertas pada periode tersebut, tetapi sejak awal 1990-an pasokan kayu mangrove sebagai meterial kertas telah berhenti karena berkurangnya area hutan mangrove yang tersisa. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, pembukaan mangrove untuk tujuan pembangunan telah meningkat secara signifikan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemicu degradasi dan deforestasi hutan bakau di Indonesia meliputi penebangan komersial, pengumpulan kayu bakar, produksi arang, konversi ke pertanian (padi dan ladang kelapa sawit), pemukiman, dan kolam budidaya (tambak), tetapi faktor utama yang menyebabkan hilangnya mangrove di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah di konversi menjadi tambak. Ekspansi besar-besaran tambak akuakultur dengan membuka kawasan mangrove telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia (Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980) tentang larangan operasi alat tanpa pukat harimau di wilayah laut sejak tahun 1980 untuk melestarikan ekosistem perairan pesisir. Larangan ini secara langsung berdampak pada mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada penangkapan udang dari laut, industri udang dan ekspor. Dengan demikian, untuk produksi udang hanya dapat dilakukan melalui kegiatan budidaya dengan melakukan konversi mangrove menjadi tambak. Hal ini turut di dukung oleh kebijakan pemerintah dengan memberikan kredit dan subsidi kepada para petani guna meningkatkan pertumbuhan produk udang agar menghasilkan devisa yang lebih besar sekaligus meningkatkan mata pencaharian mereka.

Selama periode 1980 - 2003, hutan mangrove Indonesia telah mengalami degradasi dan deforestasi sebesar 1.1 juta hektar. Nilai ini memberikan kontribusi terbesar kehilangan hutan mangrove secara global, dan lebih dari 500,000 hektar akibat dikonversi menjadi tambak (Gambar 32).

Dalam beberapa dekade terakhir, 80.000 hektar hutan mangrove di Delta Mahakam, Kalimantan Timur telah dikonversi menjadi tambak udang. Di Sulawesi Selatan, pada tahun 1950an luasan kawasan mangrove mencapai 100 ribu hektar, tetapi pada tahun 2005, berdasarkan laporan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) atau sejak tahun 2012 bernama Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan luasan hutan mangrove yang tersisa tinggal 12 ribuan hektar yang utamanya juga disebabkan oleh pengembangan tambak.



Gambar 32. Deforestasi Hutan Mangrove dan Pengembangan Tambak di Indonesia periode 1980 - 2012

Sumber: FAO (2007) dan Hamilton dan Casey (2016).

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari deforestasi hutan mangrove, seperti penurunan biodiversity (Kenakeragaman hayati) flora maupun fauna, terjadinya abrasi pantai, intrusi air laut,

meningkatnya emisi gas-gas rumah kaca yang selama ini tersimpan dalam hutan mangrove, dan terjadinya degradasi habitat. Namun, deforestasi hutan mangrove akibat pengembangan tambak dalam selama periode 2003 – 2012 telah mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode sebelumnya (1980 – 2003), dari 500.000 hektar menjadi 29.235 hektar (Gambar 32). Hal ini disebabkan meningkatnya intervensi kebijakan terkait konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, termasuk pengembangan kawasan mangrove sebagai kawasan ekowisata yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perlindungan hutan mangrove dan mata pencaharian masyarakat lokal yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk-produk hutan mangrove.

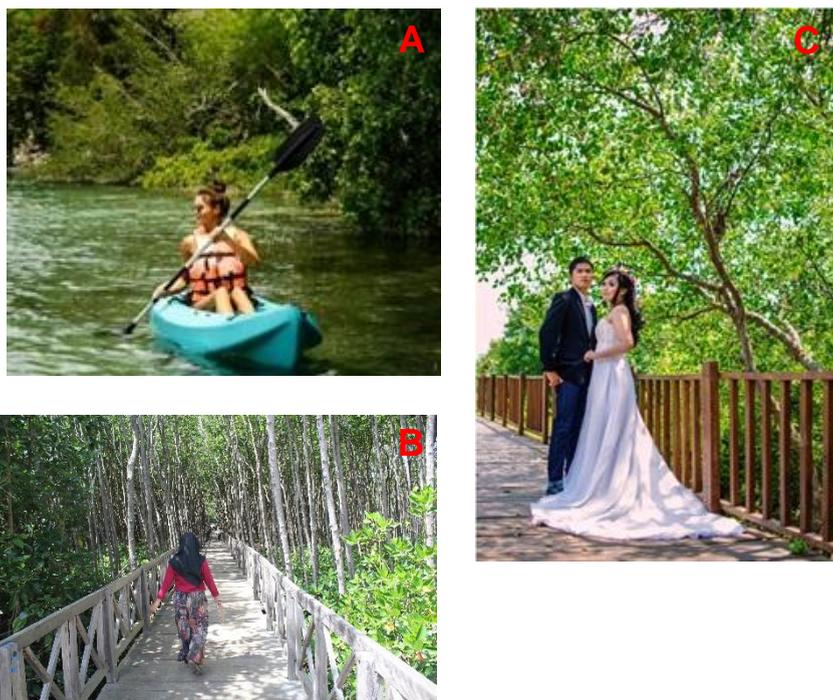
E. Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai Kawasan Ekowisata dan Persebarannya

Dengan konsep yang berbasis pada pendekatan pendidikan, pemeliharaan dan konservasi alam serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat, ekowisata telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kerusakan hutan mangrove dan peningkatan mata pencaharian masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Karakteristik unik yang dimiliki oleh hutan mangrove termasuk keragaman flora dan fauna seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadikan kawasan ini memiliki potensi yang besar bagi pengembangan ekowisata.

Beberapa atraksi wisata yang dapat dikembangkan meliputi atraksi olah raga air (seperti berselancar, berenang, *canoeing*), rekreasi seperti memancing dan penanaman bibit mangrove, trekking mangrove dan pengamatan flora dan fauna, wisata pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi siswa sekolah, mahasiswa, dan peneliti, wisata kesehatan, fotografi termasuk foto *prawedding* dan *selfie* yang

menjadi tren belakangan ini, dan atraksi adat budaya masyarakat lokal.



Gambar 33. Atraksi wisata di kawasan ekowisata mangrove: canoeing (A), trekking mangrove (B), dan foto prawedding (C).

Sumber: (A) <https://www.wandonesia.com/product/bali-mangrove-forest-canoe-eco-tour/> (B) Malik dkk. (2017b), dan (C) <http://www.rereseapan.com/hutan-mangrove-surabaya/>,

Pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata semakin penting dan berkembang di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara seperti Mangrove International Centre di Ngurah Rai Bali, kawasan mangrove di Tritih dan Segara Anakan Jawa Tengah, kawasan mangrove di Pantai Bali Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, kawasan mangrove di Pantai Tanjung Bara Kutai Timur Kalimantan, kawasan mangrove Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai dan di gugus Pulau Tanekeke, Kabupaten Takalar Sulawesi

Selatan, dan kawasan mangrove di Kelurahan Bebanga Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, kawasan mangrove di Kuala Selangor Nature Park, Malaysia, Yaring Mangrove Education Center di Pattani, Thailand, dan Mangrove Chek Jawa di Pulau Ubin, Singapura.



Gambar 34. Kawasan Ekowisata Mangrove Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Sumber: Malik dkk. (2017b)

BAB VIII

KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE

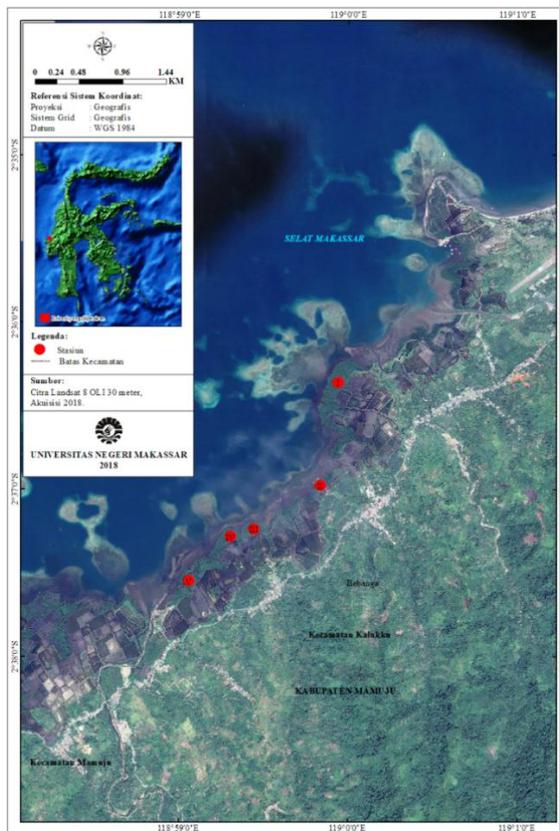
A. Pendahuluan

Dengan berbagai fungsi, manfaat dan layanan ekosistem yang dimiliki oleh hutan mangrove, upaya pemanfaatan guna memenuhi kebutuhan hidup telah banyak dilakukan dan telah berlangsung lama oleh masyarakat termasuk dalam pemanfaatannya sebagai kawasan wisata, namun pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian kawasan mangrove masih saja terus berlangsung.

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu dari 50 destinasi pariwisata nasional di Indonesia (Gambar 17), menyimpan banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang produktif, menghasilkan pendapatan daerah dan memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat, salah

satunya kawasan ekowisata hutan mangrove yang terletak di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku.

Secara geografis kawasan ini terletak antara $2^{\circ}35'7.88''\text{LS}$ - $2^{\circ}44'8.62''\text{LS}$ dan antara $118^{\circ}58'32.04''\text{BT}$ - $119^{\circ} 3'15.74''\text{BT}$ (Gambar 35). Lokasi ini terletak sekitar 20 km dari Kota Mamuju dan kurang lebih 6 km dari bandara udara Tampa Padang, kabupaten Mamuju. Objek wisata di daerah ini masuk dalam kategori ekowisata yang menyajikan dominasi hutan mangrove yang dapat menjadi lokasi kunjungan wisata setiap akhir pekan bagi wisatawan guna menikmati alam dan kesegaran suasananya.



Gambar 35. Kawasan Ekowisata Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan lima stasiun pengamatan
Sumber: Malik dkk. (2018).

Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai kawasan ekowisata telah berlangsung sejak 2013, sayangnya potensi kawasan ekowisata ini belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana layaknya sebuah kawasan ekowisata. Selayaknya berdasarkan hasil lokakarya nasional ekowisata tanggal 25-26 Agustus 2006 di Bali, sebuah kawasan ekowisata hendaknya memenuhi prinsip-prinsip konservasi alam, edukasi, menyediakan peluang menikmati dan mencintai alam, dan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan konsisten memberi kepuasan bagi konsumen (wisatawan).

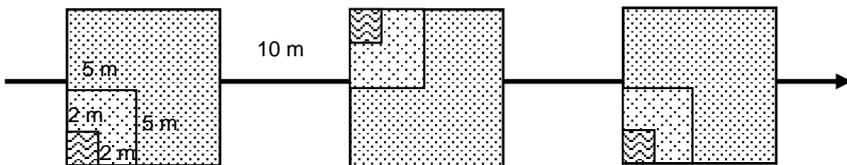
Kawasan ekowisata ini baru menawarkan obyek/atraksi wisata pada sensasi wisata kuliner sambil menikmati alam di atas pesisir pantai, di antara rimbunnya pohon mangrove. Partisipasi masyarakat terlihat masih rendah dan sarana dan prasarana penunjang ekowisata masih sangat minim.

Pada kawasan ini baru terdapat beberapa bangunan semi permanen yang dibuat dengan konsep sederhana. Bangunan-bangunan ini dihubungkan dengan jembatan yang di sanggah oleh kayu yang sebgayaan di ambil dari pohon mangrove, dengan alas terbuat dari kumpulan papan dan bambu yang diikat dan dijadikan satu sehingga tidak datar dan bergelombang. Untuk mengaksesnya, dari pintu masuk wisatawan harus berjalan kaki sejauh 150 meter dengan meniti jembatan tersebut. Selain itu, kurangnya data dan informasi yang mencakup kondisi biofisik kawasan, sosial ekonomi masyarakat dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan dan bagaimana strategi yang dibutuhkan dalam mengembangkan kawasan ekowisata ini diduga kuat menjadi salah satu kendala dasar dalam pengembangan kawasan ini.

B. Biofisik Kawasan Ekowisata

1. Keanekaragaman Flora Mangrove

Penilaian keanekaragaman flora (vegetasi) mangrove dilakukan pada lima stasiun pengamatan (Gambar 24) dengan menggunakan metode transek dengan alat dan bahan berupa kompas, klinometer, alat hitung (*tally counter*), roll meter, tali plastik, dan buku identifikasi spesies mangrove. Setiap site yang telah ditentukan diterapkan 3 garis transek dengan panjang transek tergantung pada ketebalan kawasan mangrove. Ketebalan mangrove ini terlebih dahulu diukur dengan menarik garis lurus dengan garis pantai dengan menggunakan rol meter dari bagian darat di mana tumbuhan mangrove masih ditemukan ke batas laut. Pada setiap transek dibuat 3 plot dengan ukuran 10m x 10m untuk level pohon, 5m x 5m untuk level anakan mangrove (*sapling*) dan 2m x 2m untuk level bibit mangrove (*seedling*) dengan jarak antar plot seimbang dan tergantung dengan ketebalan mangrove (Gambar 36). Pada setiap plot ditandai posisinya dengan menggunakan GPS (*Global positioning System*).



Gambar 36. Transek garis dan plot pengamatan mangrove
Sumber: Malik dkk. (2018).

Selanjutnya, dilakukan identifikasi nama spesies (mengacu pada buku identifikasi tumbuhan mangrove) dan jumlah individu mangrove baik untuk level pohon, anakan dan bibit pada setiap plot dan mengukur diameter batang pohon mangrove pada ketinggian dada (*diameter at breast height* (DBH)) dan tinggi pohon mangrove (Gambar 37).



Gambar 37. Survei vegetasi mangrove
 Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 5. Spesies mangrove yang teridentifikasi

No.	Nama Family	Nama Spesies	Nama Lokal	Stasiun				
				I	II	III	IV	V
1	Avicenniaceae	<i>Avicennia marina</i>	<i>Pajapi</i>	+	-	-	+	+
2	Rhizophoraceae	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	<i>Tanjang</i>	+	+	+	+	-
3	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mucronata</i>	<i>Pangkang</i>	+	+	+	+	+
4	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora stylosa</i>	<i>Pangkang</i>	+	+	+	+	+
5	Sonneratiaceae	<i>Sonneratia alba</i>	<i>Padada</i>	+	+	-	+	+
6	Sonneratiaceae	<i>Sonneratia caseolaris</i>	<i>Padada</i>	-	-	+	-	-
7	Meliaceae	<i>Xylocarpus granatum</i>	<i>Buli cella</i>	-	-	+	-	-
Jumlah Spesies				5	4	5	5	4

(+) Ditemukan; (-) tidak ditemukan

Sumber: Malik dkk. (2018).

Hasil penilaian keanekaragaman vegetasi pada kawasan ekowisata di Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa vegetasi mangrove di kawasan ini terdiri dari 4 famili (Avicenniaceae, Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, dan Meliaceae) dan 7 spesies yang meliputi *Avicennia marina* (Am), *Bruguiera gymnorrhiza* (Bg), *Rhizophora mucronata* (Rm), *Rhizophora stylosa* (Rs), *Sonneratia alba* (Sa), *Sonneratia caseolaris* (Sc), dan *Xylocarpus granatum* (Xg). Sebaran spesies tersebut pada setiap stasiun antara 4 - 5 spesies, namun ada 3 spesies yakni *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora mucronata*, dan *Rhizophora stylosa* ditemukan di semua stasiun (Tabel 5).

Selanjutnya hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa tingkat kerapatan mangrove pada kawasan ini untuk tingkat pertumbuhan pohon antara 0.22 ind./m² – 1.02 ind./m², anakan antara 0.06 ind./m² – 1.31 ind./m², dan semai antara 0.31 ind./m² – 1.98 ind./m². Kerapatan tertinggi untuk tingkat pertumbuhan pohon ditemukan pada stasiun I (1.02 ind./m²), sedangkan untuk anakan dan semaian masing-masing ditemukan di stasiun III (1.03 ind./m² dan 1.98 ind./m²) (Tabel 6).

Tabel 6. Kerapatan mangrove berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun

Tingkat Pertumbuhan	Kerapatan mangrove tiap Stasiun (ind./m ²)					Nilai Kerapatan Max - Min
	I	II	III	IV	V	
Pohon	1.02	0.34	0.70	0.61	0.51	1.02
	0.92	0.22	0.63	0.50	0.36	0.22
Anakan	0.53	0.18	1.31	0.66	0.44	1.31
	0.37	0.06	0.64	0.51	0.36	0.06
Semaian	0.95	0.41	1.98	0.92	0.66	1.98
	0.7	0.31	0.78	0.68	0.63	0.31

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 7. Indeks Nilai Penting (INP) berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun

Jenis Pertumbuhan	Spesies	Stasiun					INP	
		I	II	III	IV	V	Max	Min
Pohon	Am	45.88	-	-	45.15	-	45.88	45.15
	Bg	59.89	97.11	61.80	60.25	-	97.11	59.89
	Rm	110.24	230.41	101.31	101.91	138.11	230.41	101.31
	Rs	44.67	69.59	49.17	56.97	60.11	69.59	44.67
	Sa	61.72	94.45	-	65.05	61.94	94.45	61.72
	Sc	-	-	68.66	-	-	68.66	68.66
	Xg	-	-	45.15	-	58.48	58.48	45.15
Anakan	Am	36.28	-	-	35.20	47.73	47.73	35.20
	Bg	39.71	36.11	28.36	29.42	-	39.71	28.36
	Rm	64.25	200.00	66.83	64.25	74.49	200.00	64.25
	Rs	34.99	-	43.10	40.87	47.45	47.45	34.99
	Sa	44.70	-	-	41.26	49.49	49.49	41.26
	Sc	-	-	37.14	-	-	37.14	37.14
	Xg	-	-	33.92	-	-	33.92	33.92
Semaian	Am	36.71	-	-	36.31	45.45	45.45	36.31
	Bg	38.24	-	32.05	30.60	-	38.24	30.60
	Rm	60.58	146.77	70.05	66.15	71.72	146.77	60.58
	Rs	32.23	75.81	46.45	38.46	46.97	75.81	32.23
	Sa	44.67	26.48	-	38.46	51.08	51.08	26.48
	Sc	-	-	38.46	-	-	38.46	38.46
	Xg	-	-	35.90	-	-	35.90	35.90

Am = *Avicennia marina*, Bg = *Bruguiera gymnorrhiza*, Rm = *Rhizophora mucronata*, Rs = *Rhizophora stylosa*, Sa = *Sonneratia alba*, Sc = *Sonneratia caseolaris*, dan Xg = *Xylocarpus granatum*.

Sumber: Malik dkk. (2018).

Untuk Indeks Nilai Penting (INP) yang menunjukkan dominansi suatu spesies tumbuhan pada suatu kawasan, diperoleh bahwa pada semua tingkat pertumbuhan (pohon, anakan dan semai) dan semua stasiun utamanya pada stasiun II, *Rhizophora mucronata* merupakan spesies yang dominan (Gambar 38), diikuti oleh *Bruguiera gymnorhiza* untuk pohon pada stasiun II, *Sonneratia alba* untuk anakan pada stasiun V, dan *Rhizophora stylosa* untuk semaian pada stasiun II (Tabel 7).



Gambar 38. *Rhizophora mucronata*, spesies mangrove yang mendominasi kawasan ekowisata mangrove
Sumber: Malik dkk. (2018).

Untuk tingkat keanekaragaman jenis (H'), berdasarkan formula Shannon-Wiener, diperoleh bahwa nilai keanekaragaman jenis untuk pohon dan anakan tertinggi pada stasiun IV, dengan nilai masing-masing yakni 1.40 dan 1.48, sedangkan untuk semai tertinggi pada stasiun I yakni 1.55 (Tabel 7). Berdasarkan kriteria indeks keanekaragaman Shannon–Wiener, keanekaragaman jenis pada kawasan ekowisata mangrove umumnya berada pada kategori

sedang ($1 < H' \leq 3$), kecuali pada stasiun II baik pada tingkat pertumbuhan pohon, anakan maupun semai dan stasiun V pada tingkat pertumbuhan pohon berada pada kategori rendah ($H' < 1$) (Tabel 8).

Tabel 8. Tingkat keanekaragaman jenis

Tingkat Pertumbuhan	Tingkat Keanekaragaman Jenis (H') per Stasiun				
	I	II	III	IV	V
Pohon	1.25	0.54	1.21	1.40	0.90
Anakan	1.49	0.12	1.45	1.48	1.27
Semai	1.55	0.55	1.39	1.46	1.32

Sumber: Malik dkk. (2018).

2. Keanekaragaman Fauna Mangrove

Untuk pengamatan fauna (satwa), di amati secara langsung jenis burung dan reptil atau menggunakan teropong selama 1 minggu yang tiap harinya dilakukan selama 4 jam (pagi hari pada pukul 07.00-09.00 dan sore hari pukul 15.30-17.30) dan mengacu pada buku identifikasi jenis burung dan reptil. Untuk jenis biota perairan (ikan, kepiting, dan udang) di amati dengan metode transek sabuk (*belt transect*). Ukuran (lebar) transek sesuai disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Hasil menunjukkan bahwa pada kawasan ekowisata mangrove dihuni oleh beberapa jenis satwa seperti burung, reptil, ikan, dan crustacea. Selengkapnya mengenai jenis satwa yang menghuni kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga ini sebagai berikut (Tabel 9):

Tabel 9. Jenis satwa

No.	Jenis Satwa	Nama satwa	Nama Ilmiah
1	Burung	Walet	<i>Collocalia sp.</i>
		Bangau	<i>Ciconia sp.</i>
		Cekakak	<i>Halycon sp.</i>
		Kuntul	<i>Egretta sp.</i>
2	Reptil	Biawak	<i>Varanus sp.</i>
		Kadal	<i>Dasia sp.</i>
		Ular air	<i>Cerberus sp</i>
		Ular pohon	<i>Chrysopelea sp.</i>
3	Ikan	Bandeng	Chanos chanos
		Balanak	<i>Mugilidae</i>
		Gelodok	<i>Periophthalmus</i> sp
4	Crustacea	Udang	<i>Penaeus sp.</i>
		Kepitng Bakau	<i>Episesarma sp.</i>
		Kepitng Bakau	<i>Thalamita sp.</i>
		Kepitng Bakau	<i>Scylla sp.</i>

Sumber: Malik dkk. (2018).

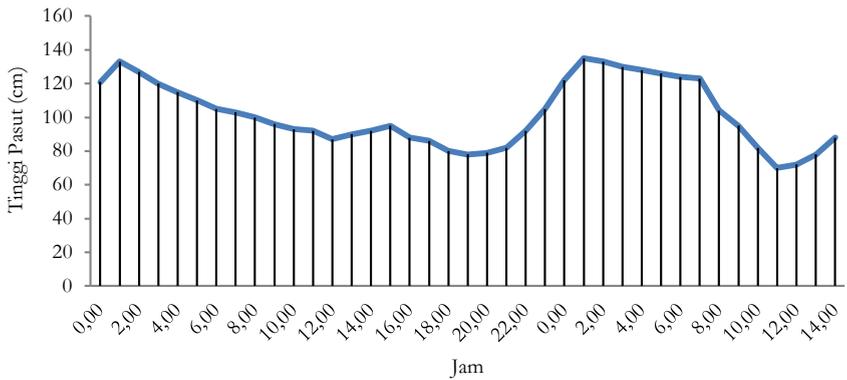


Gambar 39. *Varanus* sp. (biawak), salah satu reptil yang terdapat di kawasan ekowisata mangrove.
Sumber: Malik dkk. (2018).

3. Pasang Surut

Pengukuran pasang surut (pasut) dilakukan selama 39 jam secara berturut-turut dengan menggunakan tiang pasut (*tide gauge*) guna memperoleh data ketinggian pasut (tertinggi dan terendah) dan nilai rata-rata ketinggian permukaan air (*Mean Sea Level*). Hasil analisis ketinggian air pasang di kawasan ini mencapai 135 cm dan air surut mencapai 70 cm, sedangkan nilai rata-rata ketinggian permukaan air (*Mean Sea Level*) mencapai 102 cm. Tipe pasang surut yang terjadi di kawasan ini termasuk tipe campuran condong ke

harian ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*) yang mana dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda (Gambar 40).



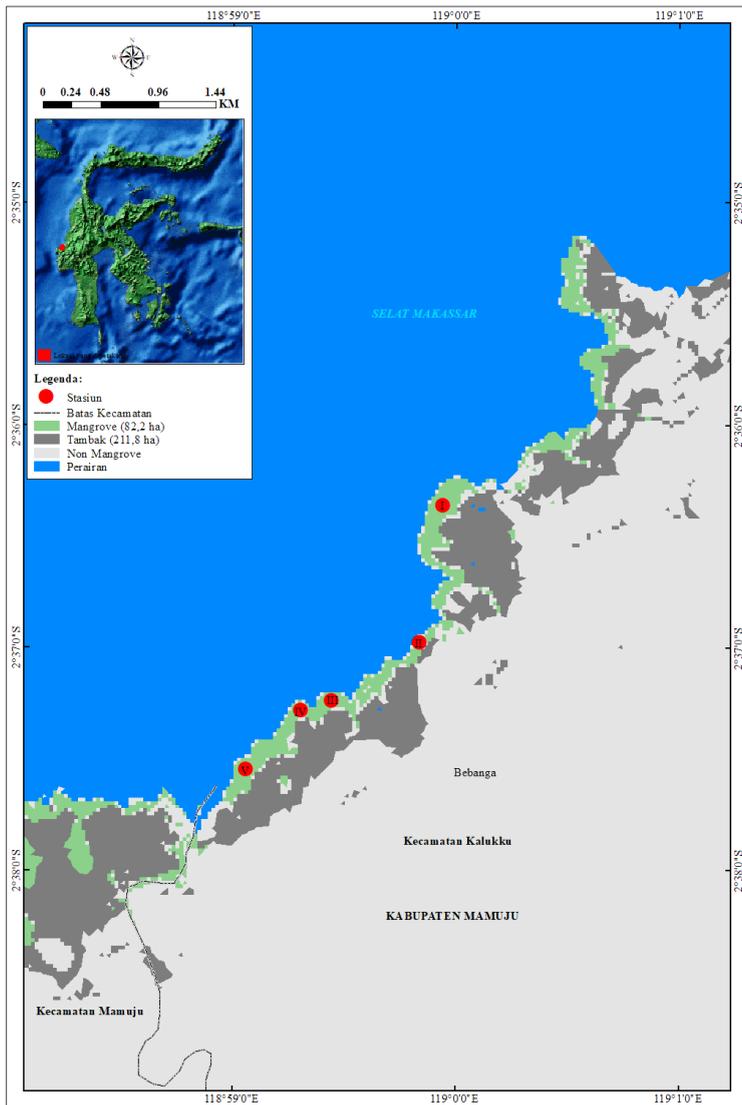
Gambar 40. Pasang surut air laut kawasan ekowisata mangrove
 Sumber: Malik dkk. (2018).

4. Luasan, Sebaran dan Ketebalan Vegetasi Mangrove

Penilaian luasan, sebaran dan ketebalan vegetasi mangrove dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi citra dengan menggunakan citra Landsat 8 akusisi 27 februari 2018. Proses pengolahan citra meliputi koreksi geometrik, *False Color Composite* (FCC), pengklasifikasian citra dengan metode *supervised maximum likelihood* guna membedakan obyek tutupan mangrove yang tidak terganggu/rusak dan terganggu dan obyek lainnya. Proses interpretasi citra ini menggunakan software ER Mapper 7.0. Proses selanjutnya, citra yang telah terklasifikasi kemudian di vegetasi mangrove, dan dilakukan layout peta kawasan ekowisata mangrove sebagai luaran dari proses ini dengan software ArcGIS 10.5.

Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa luasan hutan mangrove yang termasuk dalam kawasan ekowisata di Kelurahan Bebanga sebesar 82.2 ha dan tersebar sepanjang pantai kelurahan tersebut, dengan luasan terbesar berada di bagian Timur Laut

kelurahan tersebut (Gambar 41). Ketebalan tertinggi hutan mangrove dari arah laut menuju daratan yang masih ditemukan mangrove mencapai 213 m (stasiun I) dan terendah 111 m (stasiun II), dengan nilai ketebalan rata-rata 161 m (Tabel 10, Gambar 41).



Gambar 41. Luasan, sebaran dan ketebalan mangrove
 Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 10. Ketebalan vegetasi mangrove

Stasiun	Letak Geografis		Ketebalan (m)
	LS	BT	
I	-2°36'21.57"	118°59'56.44"	213
II	-2°36'58.66"	118°59'50.06"	111
III	-2°37'14.34"	118°59'26.53"	120
IV	-2°37'16.93"	118°59'18.11"	150
V	-2°37'32.88"	118°59'3.30"	210
	Rata-rata		161

Sumber: Malik dkk. (2018).

C. Kesesuaian Kawasan Mangrove sebagai Kawasan Ekowisata

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan kawasan ekowisata mangrove dengan menggunakan metode pembobotan dan skoring berdasarkan nilai ketebalan, kerapatan, dan jumlah spesies mangrove, ketinggian pasang surut dan jumlah obyek satwa liar dan biota perairan diperoleh (Tabel 11). Tingkat kesesuaian stasiun I dan V sebagai kawasan ekowisata mangrove berada pada kriteria “Sangat Sesuai” (84%), sedangkan 3 stasiun lainnya (II, III dan IV) berada pada tingkat “Sesuai” (78%) (Tabel 10). Terdapatnya dua tingkatan kesesuaian ini, utamanya disebabkan oleh parameter ketebalan mangrove yang berbeda, di mana pada stasiun I dan V ketebalan mangrove di atas 200 m, sedangkan pada stasiun II, III, dan IV di bawah 200 m.

Tabel 11. Hasil analisis kesesuaian kawasan ekowisata mangrove

No.	Parameter	Bobot	Stasiun I		Stasiun II		Stasiun III		Stasiun IV		Stasiun V	
			Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni
1	Ketebalan mangrove (m)	5	3	15	2	10	2	10	2	10	3	15
2	Kerapatan mangrove (100 m ²)	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
3	Jenis mangrove	4	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
4	Pasang surut (m)	3	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
5	Obyek satwa liar dan biota perairan	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Jumlah		-	-	64	-	59	-	59	-	59	-	64
Persentase (%)		-	-	84	-	78	-	78	-	78	-	84
Kategori Kesesuaian		-	-	S1	-	S2	-	S2	-	S2	-	S1

S1 = sangat sesuai (80-100%); S2 = Sesuai (60-<80%); S3 = Sesuai bersyarat (35-<60%), dan N = Tidak Sesuai (<35%). Sumber: Malik dkk. (2018).

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi data umur responden, pendidikan, mata pencaharian, sumber, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan yang disajikan pada Tabel 12 – 18.

Umur masyarakat Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang menjadi responden didominasi umur antara 30-40 tahun (43%) yang di ikuti oleh umur di bawah 30 tahun (29%) dan terendah di atas 50 tahun (7%) (Tabel 12) yang mana perbandingan antara yang memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidaklah jauh berbeda (hampir seimbang, laki-laki 55% dan perempuan 45%) (Tabel 13).

Tabel 12. Umur

Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
<30	29	29
30-40	43	43
41-50	21	21
>50	7	7
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 13. Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	55	55
Perempuan	45	45
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 14. Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	19	19
SD	20	20
SMP	16	16
SMA	40	40
PT	5	5
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tingkat pendidikan mereka (responden) umumnya mencapai SMA (40%) dan diikuti oleh SD dan tidak sekolah yang masing-masing 20% dan 19% (Tabel 14). Hampir sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (45%), sedangkan sisanya ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan lainnya (Tabel 15).

Tabel 15. Mata pencaharian masyarakat

Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Nelayan	45	45
Petani	16	16
Pemungut Hasil Hutan	0	0
Lainya	39	39
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tingkat pendapatan per bulan yang dimiliki oleh mereka hampir seimbang baik yang memiliki pendapatan di bawah 5 ratus ribu rupiah, antara 5 ratus ribu dan 1 juta rupiah dan di atas 1 juta rupiah, namun yang tertinggi di bawah 5 ratus ribu rupiah (36%) (Tabel 16).

Tabel 16. Pendapatan masyarakat

Pendapatan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	36	36
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	32	32
> Rp 1.000.000	32	32
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Sementara itu, untuk tingkat pengeluaran, juga demikian (hampir seimbang) dimana tingkat pengeluaran di bawah 5 ratus ribu rupiah (39%) dan diikuti oleh tingkat pengeluaran antara 5 ratus ribu dan 1 juta rupiah dan di atas 1 juta rupiah masing-masing 32% (Tabel 17). Umumnya mereka memiliki jumlah tanggungan di bawah 3 orang (57%) dan diikuti oleh jumlah tanggungan antara 3 – 5 orang (33%) (Tabel 18).

Tabel 17. Pengeluaran masyarakat

Pengeluaran	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	39	39
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	31	31
> Rp 1.000.000	30	30
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 18. Jumlah tanggungan

Pengeluaran	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
<3	57	57
3-5	33	33
>5	10	10
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

E. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Persepsi dan partisipasi masyarakat meliputi data tentang pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan mangrove dan jenis pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan, kesediaan dan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemerintah terkait pengembangan kawasan ekowisata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove (Tabel 19). Namun, fungsi hutan mangrove yang paling dikenal oleh masyarakat yakni sebagai kawasan ekowisata (25%) yang diikuti oleh fungsi hutan mangrove dalam mencegah abrasi pantai (19%), sedangkan dari sisi kemanfaatan, manfaat sebagai tempat berwisata alam juga merupakan yang paling dikenal oleh masyarakat (34%) dan diikuti oleh manfaat sebagai tempat mengambil berbagai jenis ikan, kepiting, udang dan burung (30%) (Tabel 20).

Tabel 19. Fungsi hutan mangrove

Fungsi hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Mencegah abrasi pantai	19	19
Tempat memijah dan membesar berbagai organisme perairan	11	11
Tempat bersarang berbagai satwa liar	15	15
Menyediakan kawasan ekowisata	25	25
Penghasil kayu dan non kayu	15	15
Tidak Tahu	15	15
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 20. Manfaat hutan mangrove

Manfaat hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tempat mengambil kayu untuk kayu bakar, bahan baku arang dan kertas	25	25
Tempat mengambil berbagai jenis ikan, kepiting, dan udang	30	30
Sebagai tempat berwisata alam	34	34
Tidak Tahu	11	11
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Selanjutnya, hampir sebagian besar (45%) masyarakat menyatakan bahwa kondisi hutan mangrove yang menjadi kawasan ekowisata dalam kondisi semakin baik (Tabel 21). Hal ini didasari oleh penilaian masyarakat yang hampir sebagian besar (45%) menyatakan kondisi flora dan fauna-nya dalam kondisi baik (Tabel 22) dan keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove yang juga rata-rata baik (cukup baik 34%, baik 36% dan sangat baik 30%) (Tabel 23; Gambar 42).

Tabel 21. Kondisi hutan mangrove

Kondisi hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Semakin Baik	45	45
Masih Baik	39	39
Mulai Rusak	9	9
Sudah Rusak	7	7
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 22. Kondisi flora dan fauna kawasan ekowisata mangrove

Kondisi flora dan fauna kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	45	45
Cukup Baik	38	38
Tidak Baik	17	17
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).



Gambar 42. Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove
Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju
Sumber: Malik dkk. (2018)

Tabel 23. Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove

Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	30	30
Baik	36	36
Cukup Baik	34	34
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Terkait dengan fasilitas umum dalam menunjang sebuah kawasan ekowisata mangrove, hampir sebagian besar menilai fasilitas umum yang ada masih dalam taraf cukup baik (41%) dan baik (32%), namun terdapat 27% yang menilai tidak baik (Tabel 24; Gambar 43).

Tabel 24. Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove

Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	32	32
Cukup Baik	41	41
Tidak Baik	27	27
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).



Gambar 43. Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove: (A) Pintu gerbang, (B) Area parkir, (C) Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove, (D) Media semai bibit mangrove, (E) Gazebo (ruang bersantai) bagi wisatawan, (F) Aula pertemuan, dan (G) warung makan/minum
Sumber: Malik dkk. (2018).

Kondisi jalan dalam mengakses kawasan ekowisata dinilai oleh hampir sebagian besar masyarakat juga masih cukup baik (41%) dan baik (32%), namun juga terdapat 27% yang menilai tidak baik (Tabel 25; Gambar 44). Sementara masalah ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih, hampir sebagian besar masyarakat (47%) menilai cukup baik (Tabel 26; Gambar 45), sedangkan biaya masuk kawasan ekowisata sebesar 5,000 rupiah bagi setiap pengunjung yang dikenakan oleh pengelola dianggap oleh masyarakat rata-rata sudah baik (Tabel 27).

Tabel 25. Kondisi jalan

Kondisi jalan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	32	32
Cukup Baik	41	41
Tidak Baik	27	27
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).



Gambar 44. (A) Kondisi jalan masuk dari pintu gerbang ke kawasan ekowisata mangrove, (B) Jalan setapak dari papan dan bambu yang membelah hutan mangrove di kawasan ekowisata mangrove

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 26. Ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih

Ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	21	21
Baik	32	32
Cukup Baik	47	47
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).



Gambar 45. Jaringan kabel untuk suplai listrik (A) dan pipa air (B) di kawasan ekowisata mangrove.

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 27. Biaya masuk

Biaya masuk	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	32	32
Baik	34	34
Cukup Baik	35	35
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Kondisi kebersihan dari kawasan ekowisata oleh sebagian besar masyarakat juga menyatakan sudah baik (Tabel 28). Sedangkan untuk peningkatan jumlah pengunjung, umumnya masyarakat menyatakan terjadi peningkatan, walau terdapat 19% yang menyatakan tidak terjadi peningkatan (Tabel 29).

Tabel 28. Kondisi kebersihan kawasan ekowisata mangrove

Kondisi kebersihan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	31	31
Baik	42	42
Cukup Baik	27	27
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 29. Kondisi jumlah pengunjung kawasan ekowisata mangrove

Kondisi jumlah pengunjung	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Meningkatkan	20	20
Meningkat	38	38
Cukup Meningkatkan	23	23
Tidak Meningkatkan	19	19
Sangat Tidak Meningkatkan	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove, umumnya masyarakat menilai bahwa keterlibatan masyarakat sudah baik (Tabel 30), sedangkan untuk keterlibatan pemerintah sendiri, lebih dari sebagian besar masyarakat menganggap pemerintah daerah kurang memiliki keterlibatan dalam pengembangan kawasan ekowisata ini (Tabel 31).

Tabel 30. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	30	30
Baik	41	41
Cukup Baik	29	29
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 31. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	19	19
Cukup Baik	19	19
Tidak Baik	33	33
Sangat Tidak Baik	29	29
Total	100	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

F. Persepsi Wisatawan

Kawasan mangrove di Kelurahan Bebanga Kabupaten Mamuju telah menjadi salah satu destinasi ekowisata di daerah ini. Dari hasil wawancara terhadap 112 wisatawan yang dilakukan selama survei lapangan, diperoleh bahwa wisatawan yang melakukan kunjungan ke kawasan ini didominasi oleh kaum muda dengan umur di bawah 30 tahun (Tabel 32) dengan porsi laki-laki maupun perempuan yang hampir seimbang (laki-laki 46% dan perempuan 54%) (Tabel 33).

Tabel 32. Umur wisatawan

Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< 30	98	88
30-40	14	13
41-50	0	0
> 50	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 33. Jenis kelamin wisatawan

Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	52	46
Perempuan	60	54
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Wisatawan ini umumnya memiliki mata pencaharian/status sebagai pelajar/mahasiswa (78%) yang diikuti oleh pegawai swasta (13%) (Tabel 34). Mereka umumnya memiliki pendapatan dibawah 500 ribu (59%) dan antara 500 ribu dan 1 juta (25%) (Tabel 35). Informasi mengenai kawasan ekowisata mangrove ini, umumnya

mereka peroleh dari teman/keluarga (54%) dan dari internet (36%) (Tabel 36).

Tabel 34. Mata pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	87	78
TNI/POLRI	0	0
PNS	1	1
Pegawai Swasta	14	13
Lain-lain	10	9
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 35. Pendapatan

Pendapatan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	66	59
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	28	25
Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000	6	5
Rp 1.500.000 - Rp 2.000.000	9	8
> Rp 2.500.000	3	3
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 36. Sumber Informasi tentang kawasan ekowisata

Sumber informasi	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Media Internet	40	36
Media Cetak	0	0
Media Elektronik	12	11
Teman/Keluarga	60	54
Lainnya	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Hampir semua wisatawan (93%) yang melakukan kunjungan ke kawasan ekowisata ini, menjadi tujuan utama kunjungan tersebut dan sisanya 7% sebagai persinggahan/transit yang kebetulan melewati kawasan ini (Tabel 37). Sebagian besar dari wisatawan yang mengunjungi kawasan ekowisata ini, memiliki tempat tinggal yang jaraknya di bawah 25 km (didominasi pada jarak 11 – 20 km (52%). Hanya terdapat 9% yang jarak tinggalnya di atas 25 km (Tabel 38).

Tabel 37. Jenis tujuan ke kawasan ekowisata

Jenis tujuan ke kawasan ekowisata	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tujuan Utama	104	93
Persinggahan/Transit	8	7
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 38. Jarak tempat tinggal ke kawasan ekowisata

Jarak Tempat Tinggal ke kawasan ekowisata (km)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< 5	23	21
5 - 10	7	6
11 - 20	58	52
21 - 25	14	13
> 25	10	9
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Untuk mengakses kawasan ekowisata ini, mereka semua menggunakan kendaraan pribadi (umumnya menggunakan motor) (Tabel 39). Terkait dengan kondisi jalan untuk mengakses kawasan ekowisata ini, mereka menganggap cukup baik (38%) dan baik

(33%), namun terdapat 29% wisatawan menganggap kurang baik (Tabel 40).

Tabe 39. Jenis transportasi yang digunakan

Jenis transportasi	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Kendaraan Pribadi	112	100
Kendaraan Umum	0	0
Kendaraan Milik Instansi	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 40. Kondisi jalan

Kondisi jalan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	37	33
Cukup Baik	43	38
Kurang Baik	32	29
Sangat Kurang Baik	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Setiap bulannya mereka bisa melakukan kunjungan ke kawasan ekowisata lebih dari 4 kali (27%), namun yang tertinggi sebanyak 2 kali (33%) (Tabel 41). Setiap melakukan kunjungan sebagian besar dari mereka bisa menghabiskan biaya antara 50 ribu sampai 100 ribu (52%) (Tabel 42).

Tabel 41. Frekuensi kunjungan per bulan

Frekuensi kunjungan per bulan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1 Kali	19	17
2 Kali	37	33
3 Kali	10	9
4 Kali	16	14
> 4 Kali	30	27
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 42. Biaya kegiatan wisata per kunjungan

Biaya kegiatan wisata per kunjungan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 50.000	30	27
Rp 50.000 - Rp 100.000	58	52
> Rp 100.000	24	21
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Terkait dengan keindahan alam kawasan ekowisata ini, mereka semuanya memuji keindahan alam kawasan ini (Tabel 43). Namun mereka semua menilai penambahan fasilitas guna menunjang kawasan ekowisata ini diperlukan (Tabel 44).

Tabel 43. Keindahan alam kawasan ekowisata

Keindahan alam kawasan ekowisata	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Indah	36	32
Indah	69	62
Biasa Saja	7	6
Jelek	0	0
Sangat Jelek	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 44. Penambahan fasilitas

Penambahan fasilitas	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Perlu	88	79
Perlu	24	21
Tidak Perlu	0	0
Total	112	100

Sumber: Malik dkk. (2018).

G. Pengembangan Kawasan Ekowisata

Dalam menentukan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove di gunakan metode analisis SWOT dengan melakukan klasifikasi data dalam 4 kelompok, kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor lingkungan internal dan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor lingkungan eksternal.

Tabel 45. Indikator variabel kekuatan dan kelemahan internal

No.	Kekuatan (<i>Strenghts</i> = S)	Bobot	Rating	Skor
S1	Kondisi hutan mangrove (kerapatan tinggi, didominasi oleh jenis <i>Rhizophora mucronata</i> , dan keanekaragaman yang cukup baik serta ketebalan mangrove yang cukup tinggi)	0.10	4	0.40
S2	Keanekaragaman satwa (burung dan reptil, ikan, kepiting dan udang) yang cukup tinggi.	0.10	3	0.30
S3	Tingkat kesesuaian lahan sebagai kawasan ekowisata mangrove pada tingkat “Sesuai”	0.10	4	0.40
S4	Memiliki keindahan dan menawarkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekowisata	0.08	3	0.24
S5	Kondisi jalan sudah cukup baik	0.07	3	0.21
S6	Kebersihan kawasan ekowisata sudah baik	0.08	3	0.24
S7	Tersedia jaringan listrik yang cukup baik	0.08	3	0.24
S8	Umumnya masyarakat telah paham terhadap fungsi dan manfaat	0.07	3	0.21

	hutan mangrove, utamanya sebagai kawasan ekowisata			
S9	Kondisi hutan mangrove yang semakin baik	0.08	3	0.24
S10	Biaya kegiatan melakukan wisata cukup murah	0.07	2	0.14
S11	Dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengembangkan kawasan ekowisata	0.10	4	0.40
S12	Letak lokasi kawasan ekowisata mangrove yang strategis (tidak jauh dari bandara, sekitar 6 km dan 20 km dari kota Mamuju)	0.07	3	0.21
Jumlah		1.00	-	3.23

Sumber: Malik dkk. (2018).

No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> = W)	Bobot	Rating	Skor
W1	Peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove masih minim	0.30	1	0.30
W2	Pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (belum melibatkan pemerintah)	0.20	1	0.20
W3	Fasilitas penunjang yang masih kurang	0.20	2	0.40

W4	Kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola kawasan ekowisata masih rendah dan belum ada pemandu khusus ekowisata mangrove	0.10	2	0.20
W5	Belum memiliki konsep detail kawasan ekowisata (rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove)	0.10	2	0.20
W6	Informasi dan promosi yang masih kurang	0.10	2	0.20
Jumlah		1,00	-	1.50

Tabel 46. Indikator variabel peluang dan ancaman eksternal

No.	Peluang (<i>Opportunities</i> = O)	Bobot	Rating	Skor
O1	Pergeseran minat wisatawan ke jenis wisata yang berbasis pendidikan, konservasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat (ekowisata)	0.20	3	0.60
O2	Jumlah wisatawan cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Mamuju	0.40	4	1.60
O3	Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi kawasan ekowisata mangrove	0.40	4	1.60
Jumlah		1,00	-	3.80

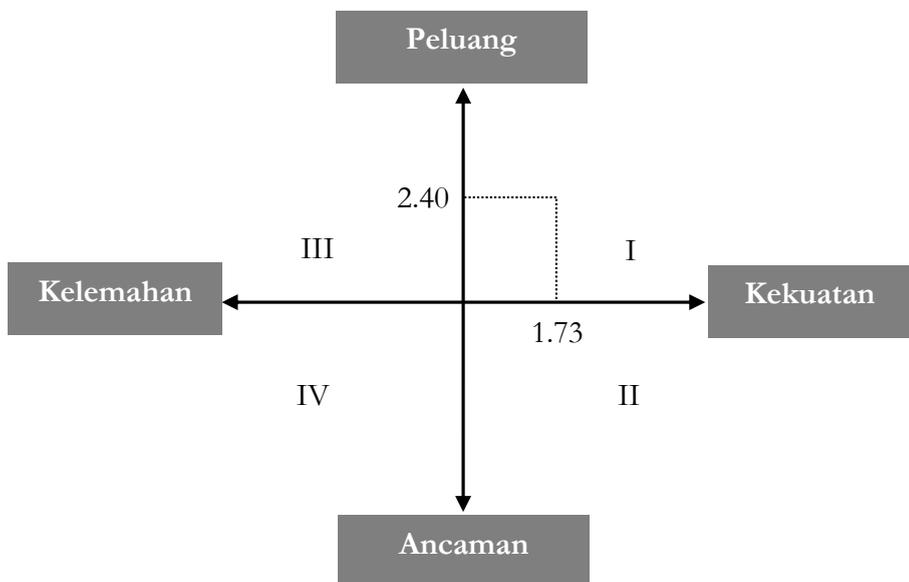
No.	Ancaman (<i>Threats</i> = T)	Bobot	Rating	Skor
T1	Konversi hutan mangrove menjadi tambak	0.60	1	0.60
T2	Penebangan kayu mangrove	0.40	2	0.80
Jumlah		1,00	-	1.40

Sumber: Malik dkk. (2018).

Tabel 47. Hasil SWOT

Jumlah Skor	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	X	Y
	3.23	1.50	3.80	1.40	1.73	2.40

Sumber: Malik dkk. (2018).



Gambar 46. Kuadran SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Sumber: Malik dkk. (2018).

Gambar 46 menunjukkan bahwa posisi kawasan mangrove kelurahan Bebangga Kabupaten Mamuju dalam pengembangan ekowisata bersifat positif (kuadran I), baik untuk faktor internal maupun eksternal. Hal ini berarti strategi yang dapat diterapkan adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*) dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada (eksternal) dan memiliki kesempatan besar untuk mengatasi kelemahan internal dan menghindari dari ancaman eksternal yang akan menghadang. Kelemahan internal yang dimiliki seperti kurangnya peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove, peningkatan fasilitas penunjang kawasan ekowisata, peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelola kawasan ekowisata, belum adanya rancangan lanskap kawasan ekowisata, dan perlunya lebih menyebarluaskan informasi dan promosi kawasan ekowisata ini dapat mengubah dari posisi strategi yang dimiliki dari kuadran I ke kuadran II yang berfokus pada produk/pasar, sehingga pemasaran wisata sudah bisa dilakukan secara ekspansif.

Selanjutnya, dengan menggunakan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal di atas, maka dilakukan pendekatan dengan menggunakan matriks SWOT, yang bertujuan untuk memformulasi alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebangga Kabupaten Mamuju, yang disajikan pada Tabel 48 berikut:

Tabel 48. Matriks SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi hutan mangrove (kerapatan tinggi, didominasi oleh jenis <i>Rhizophora mucronata</i>, dan keanekaragaman jenis yang cukup baik serta ketebalan mangrove yang cukup tinggi). 2. Keanekaragaman satwa liar (burung dan reptil, ikan, kepiting dan udang) yang cukup tinggi. 3. Tingkat kesesuaian lahan sebagai kawasan ekowisata mangrove berada pada tingkat “Sesuai” 4. Memiliki keindahan dan menawarkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekowisata. 5. Kondisi jalan sudah cukup baik. 6. Kebersihan kawasan ekowisata sudah baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove masih minim. 2. Pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (belum ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan). 3. Fasilitas penunjang yang masih kurang. 4. Kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola kawasan ekowisata masih rendah dan belum ada pemandu khusus ekowisata mangrove.

-
- | | |
|--|---|
| 7. Tersedia jaringan listrik yang cukup baik. | 5. Belum memiliki konsep detail kawasan ekowisata (rancangan lanskap kawasan ekowisata mangrove). |
| 8. Umumnya masyarakat telah paham terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove, utamanya sebagai kawasan ekowisata. | 6. Informasi dan promosi yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. |
| 9. Kondisi hutan mangrove yang semakin baik. | |
| 10. Biaya kegiatan melakukan wisata cukup murah. | |
| 11. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengembangkan kawasan ekowisata. | |
| 12. Letak lokasi kawasan ekowisata mangrove yang strategis (tidak jauh dari bandara, sekitar 6 km dan 20 km dari kota Mamuju). | |
-

EFAS	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<p>Peluang (O)</p> <p>1. Pergeseran minat wisatawan ke jenis wisata yang berbasis pendidikan, konservasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat (ekowisata).</p> <p>2. Jumlah wisatawan cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Mamuju.</p> <p>3. Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi kawasan ekowisata mangrove.</p>	<p>1. Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata (S1, S2, S3, S4, S8, S9, O1, O2, O3).</p> <p>2. Meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata (S5, S7, O2, O3).</p> <p>3. Mempertahankan dan senantiasa menjaga kebersihan kawasan ekowisata mangrove (S6, S4, S9, O2, O3).</p> <p>4. Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan terkait ekowisata dan pelayanannya dan kegiatan pemberdayaan yang dapat menunjang</p>	<p>1. Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata (W1, W2, O1, O2, O3).</p> <p>2. Peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata (W3, O2, O3).</p> <p>3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai ekowisata dan pelayanan terhadap para pengelola melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan (W4, O1, O2, O3).</p> <p>4. Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata</p>

<p>pengembangan kawasan ekowisata dan peningkatan ekonomi rumah tangga (S11, O1, O2).</p> <p>5. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/banner pada ruang-ruang publik dan di bandar udara (S12, S10, O1, O2, O3).</p>	<p>mangrove (W5, O1, O2, O3).</p> <p>5. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui berbagai media elektronik, cetak, dan ruang-ruang publik (W6, O1, O2, O3).</p>
--	---

<u>Ancaman (T)</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
<p>1. Konversi hutan mangrove menjadi tambak.</p> <p>2. Penebangan kayu mangrove</p>	<p>1. Pelarangan dan penegakan hukum terhadap kegiatan alih fungsi lahan/perluasan yang utamanya menjadi tambak (S1, S4, S9, T1).</p> <p>2. Melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan</p>	<p>1. Peningkatan partisipasi pemerintah dan meningkatkan ketegasan dalam menegakkan aturan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak</p>

tambak (S1, S4, S9, T1).	(W1, W2, T1, T2).
3. Penerapan budidaya tambak dengan pola Silviculture (S1, S4, S9, T1).	2. Melatih keterampilan dan Membuka peluang untuk pekerjaan
4. Memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan restorasi hutan mangrove (S1, S4, S9, S11, T1, T2).	alternatif (seperti pemandu wisata) bagi masyarakat lokal (W4, T1, T2).
5. Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan system tebang pilih (S1, S4, S9, T1, T2).	
6. Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan rumah	

tangga (S1, S4, S9,
S11, T1, T2).

7. Berperan serta dalam kegiatan-kegiatan layanan ekowisata mangrove guna meningkatkan ekonomi rumah tangga (S11, T1, T2)

Sumber: Malik dkk. (2018).

Rumusan strategis yang dapat diterapkan yang menjadi rekomendasi dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju:

1. Terkait Konservasi Kawasan Ekowisata Mangrove
 - a. Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata.
 - b. Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan sistem tebang pilih.
 - c. Penegakan aturan oleh aparat pemerintah terkait dan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak.
 - d. Melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan tambak.
 - e. Menerapkan sistem budidaya tambak dengan pola *Silviculture*.
 - f. Memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan restorasi hutan mangrove.
2. Terkait Ekowisata Mangrove
 - a. Meningkatkan fasilitas atraksi ekowisata mangrove guna menarik pengunjung baik terkait wisata pendidikan, seperti:

laboratorium mangrove, ruang teater pendidikan, perpustakaan, museum, pusat data dan informasi mangrove dan areal penanaman mangrove, maupun ekowisata mangrove, seperti: pengembangan *mangrove tracking* yang sudah ada, area hotspot tempat singgah, jogging, penangkaran burung, menara pengamatan burung, pemancingan, dan outbound mangrove.

- b. Pembangunan fasilitas penunjang wisata seperti musholla, klinik kesehatan, pos keamanan dan perbaikan akses menuju area wisata (jalan dan penerangan), parkir dan toilet yang representatif, dan fasilitas air dan listrik yang lebih baik.
 - c. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/spanduk pada ruang-ruang publik dan di bandar udara serta melalui berbagai media elektronik/cetak.
 - d. Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata.
 - e. Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove.
3. Terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- a. Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam menunjang pengembangan kawasan ekowisata.
 - b. Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan rumah tangga masyarakat, seperti: pemandu wisata, pembuatan souvenir, pembuatan produk hasil olahan buah mangrove, layanan warung makan/restoran yang lebih baik, dan homestay bagi wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2014. *Membangun Mimpi Pengembangan Pariwisata di Sulawesi Barat*. <http://kompadansamandar.or.id/opini/604-membangun-mimpi-pengembangan-pariwisata-di-sulawesi-barat.html> (5 Juni 2019)
- Bakosurtanal. 2009. *Peta mangrove Indonesia. Pusat Survey Sumberdaya Alam Laut*. Jakarta: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- BPS Kabupaten Mamuju. 2017. *Kabupaten Mamuju dalam angka 2017*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://mamujukab.bps.go.id/publication/2017/08/11/e9d44a83ad3f858919154d40/kabupaten-mamuju-dalam-angka-2017.html> (18 April 2019)
- BPS Indonesia. 2018. *Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk 1997-2017*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/14/1387/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-1997-2017.html> (12 April 2019)
- Chandra, W. 2014. *Yuk, Berwisata ke Rumah Pohon Saluleang*. <http://www.mongabay.co.id/2014/10/22/yuk-berwisata-ke-rumah-pohon-saluleang/> (15 April 2019)
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, Y., Putra, S.G., & Sitepu, M.J. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- English, S., Wilkinson, C., & Baker, V. 1997. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*, 2nd edition. Australian Institute of Marine Science, Townsville, pp 119-195.
- FAO. 2007. *The World's Mangroves 1980 - 2005*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

- Ghufran, M.H.K.K. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Giesen, W., Wulffraat, S., Zieren, M., & Scholten, L. 2007. *Mangrove guidebook for Southeast Asia*. Bangkok: Food and Agriculture Organization.
- Giri, C., Oching, E., Tieszen, L.L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., & Duke, N. 2011. Status and Distribution of Mangrove Forests of the World Using Earth Observation Satellite Data. *Global Ecology Biogeography*, 20, 154-159.
- Gita, R. S. D. 2017. Keanekaragaman Jenis Kepiting Bakau (*Scylla* Spp.) Di Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi*, 1(2), 148-161
- Gunarto 2004. Konservasi Mangrove sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai. *Jurnal Litbang Pertanian*, 23 (1), 15-21.
- Gunn, G. 1993. *Tourism Planning. Basics, Concepts, Cases*. Third Edition. Taylor & Francis Publisher.
- Hadinoto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Hidayati, D. 2003. *Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hogarth, P. 2007. *The Biology of Mangroves and Seagrass*, second ed. New York : Oxford University Press.
- Ilman, M., Wibisono, I.T.C., & Suryadiputra, I.N.N. 2011. *State of the Art Information on Mangrove Ecosystem in Indonesia*. Bogor: Wetland International-Indonesia Programme.
- Ilman, M., Dargusch, P., & Dart, P. 2016. A Historical Analysis of the Drivers of Loss and Degradation of Indonesia's Mangroves. *Land Use Policy*, 54, 448-459.
- Karlina, E. 2010. Strategi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Mangrove Pantai Tanjung Bara Sangatta, Kabupaten Kutai

- Timur, Propinsi Kalimantan Timur. *Tesis Magister*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang *Penghapusan JaringTrawl*. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/858/kp0391980.pdf> (12 April 2019)
- Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang *Strategi Nasional untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50936fb708d73/parent/lt50936cd1de16b>. (12 April 2019)
- Kusmana, C. 2014. Distribution and Current Status of Mangrove Forests in Indonesia, *in*: Faridah-Hanum I., Latiff A., Hakeem K.R., Ozturk M. (Eds.), *Mangrove Ecosystems of Asia*. Springer, New York, pp. 37-60.
- Kusmana, C. 2015. Integrated Sustainable Mangrove Forest Management. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 5, 1-6.
- Laapo, A., Fahrudin, A., Bengen, D.G., & Damar, A. 2010. *Kajian Karakteristik dan Kesesuaian Kawasan Mangrove di Gugus Pulau Togeian Taman Nasional Kepulauan Togeian*. *Forum Pascasarjana*, 33(4), 251-261.
- Laoli, N. 2019. *Pendapatan Devisa Parwisata Tahun ini ditargetkan Naik 17,6% jadi US\$20 miliar*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pendapatan-devisa-parwisata-tahun-ini-ditargetkan-naik-176-jadius-20-miliar>. (18 Juni 2019)
- Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., & Chipman, J. 2008. *Remote sensing and image interpretation*, 6th edition. New York: Wiley.
- Lindberg, H. 1995. *Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan*. North Benington Vermont: The Ecotourism Society.
- Malik, A. 2015. Change Detection and Sustainable Policies of Mangrove Forests. *PhD Thesis*. Department of Geosciences and Natural Resource Management, Faculty of Science, University of Copenhagen.

- Malik, A., Fensholt, R., & Mertz, O. 2015. Economic Valuation of Mangroves for Comparison with Commercial Aquaculture in South Sulawesi, Indonesia. *Forests*, 6, 3028–3304.
- Malik, A., Fensholt, R., & Mertz, O. 2015. Mangrove Exploitation Effects on Biodiversity and Ecosystem Services. *Biodiversity and Conservation*, 24, 3543-3557.
- Malik, A., Mertz, O., & Fensholt, R. 2017. Mangrove Forest Decline: Consequences for Livelihoods and Environment in South Sulawesi. *Regional Environmental Change*, 17, 157-169.
- Malik, A., Rahim A., & Sideng, U. 2017b. Assessment of Potentials for Payment for Mangrove Ecosystem Services in South Sulawesi Indonesia. *Final Report Dipa Biotrop 2017*. Ministry of National Education Culture – Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP).
- Malik, A., Rahim, A., & Sideng, U. 2018. Strategi dan Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Makassar: *Laporan Akhbir Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)*, Universitas Negeri Makassar.
- Millennium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystem and Human Well-being: Wetlands and Water Synthesis*. Washington, DC: World Resource Institute.
- Manassrisuksi, K., Weir, M. & Hussin, A. 2001. Assessment of mangrove rehabilitation programmer using remote sensing and GIS: A case study of Amphur Khlung, Chantaburi Province, Eastern Thailand. Singapore: *Conference paper at the 22nd Asian Conference on Remote Sensing 5 – 9 November 2001*.
- Mondino, E., & Beery, T. 2018. Ecotourism as a Learning Tool for Sustainable Development. Italiy: The Case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy. *Journal of Ecotourism*, 18, 1-15.
- Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I.N.N. 2006. *Panduan pengenalan mangrove di Indonesia, second ed*. Bogor: PKA/WI-IP (Wetlands International-Indonesia Programme).

- Nurisyah. 2001. Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia. *Buletin Taman dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan*, 3(2).
- Nurkin, B. 1994. Degradation of Mangrove Forests in South Sulawesi, Indonesia. Indonesia: *Hydrobiologia*, 285, 271–276.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. <https://www.bphn.go.id/data/documents/11pp050.pdf>. (12 April 2019)
- Putra, W. 2014. Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 2(2).
- Rachman, A. 2012. *Sektor Pariwisata Penyumbang Devisa Nomor 5*. <https://economy.okezone.com/read/2012/02/11/450/573811/sektor-pariwisata-penyumbang-devisa-nomor-5>. (18 Juni 2019)
- Raffaelli, D., Hawkins, S. 1996. *Intertidal Ecology*. London: Chapman & Hall. 356 halaman.
- Rangkuti. 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Richards, D.R., & Friess, D.A. 2016. Rates and Drivers of Mangrove Deforestation in Southeast Asia, 2000-2012. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113, 344-349.
- Rutana, F.F. 2011. Studi Kesesuaian Ekosistem Mangrove sebagai Obyek Ekowisata di Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin.
- Sawitri, R., Bismark, M., & Karlina, E. 2013. Ekosistem Mangrove sebagai Obyek Wisata Alam di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 10(3), 297-314.

- Sidik, A.S. 2008. The Changes of Mangrove Ecosystem in Mahakam Delta Indonesia: A Complex Social-Environmental Pattern of Linkages in Resources Utilization. *The South China Sea Conference*, Kuantan, Malaysia, 25–29 November 2008.
- Spalding, M. 2010. *World Atlas of Mangroves*. London: Routledge.
- Suyitno. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Yoeti, O.A. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wardiyanta, M. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tomlinson, P.B. 1986. *The Botany of Mangroves*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Tuwo, A., Tresnati, J., & Parawansa, B.S. 2009. Analisis Kelayakan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kepulauan Tanakeke. *Jurnal Sains & Teknologi*, 9(3), 218-225.
- Wahyuni, P.I., Ardhana, I.P.G., & Sunarta, I.N. 2007. Evaluasi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Tahura Ngurah Rai. *Ecotrophic*, 4 (1), 49-56.
- Widowati, S. 2012. Kajian Potensi dan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip dan Kriteria Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi. *Tesis Magister*. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali.
- Wood, M. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices, and Policies for Sustainability*. UNEP.
- WTO (2010). *Tourism and Biodiversity-Achieving Common Goals Towards Sustainability*. Spain.: UNWTO, Madrid.
- Yulianda, F. 2007. Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi. *Makalah Seminar Sains* 21 Februari 2007. Bogor: Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

- Zain, Z., Hutabarat, S., Prayitno, S.B., & Ambaryanto, A. 2014. Potency of Mahakam Delta in East Kalimantan Indonesia. *International Journal of Science and Engineering*, 6, 126-130.
- Zain, Z. 2014. *Objek Wisata Hutan Bakau (Mangrove) Kota Mamuju, Sulawesi Barat*. <https://kompadansamandar.blogspot.com/2014/05/objek-wisata-hutan-bakau-mangrove-kota.html>. (12 April 2019).

INDEKS

A

Adventure Tourism, 20
agen perjalanan, 28, 36
akomodasi, 23, 27, 29, 31, 33, 34,
38, 56, 58, 68
anakan, 89, 91, 93
analisis SWOT, 118
Apartemen, 35
associate mangrove, 75
asuransi pariwisata, 28
Attraction, 23
Avicennia marina, 90, 91, 92

B

biodiversity, 82
biro perjalan umum, 28
border crossing, 7
Bruguiera gymnorhiza, 90, 91, 92, 93
bungalow, 27
Bungy Jumping, 20

C

cagar alam, 17
catering, 29, 35
citra Landsat 8, 97
comfort, 33
cottage, 35
cruise, 27, 30, 31, 37
crustacea, 94
Cultural services, 71

D

Daerah Tujuan Wisata (DTW), 23,
24

deforestasi, 3, 81, 82
degradasi, 3, 81, 82
destinasi pariwisata nasional, 43
diameter at breast height, 89

E

eco-lodge, 68
Ekologi, 58
ekowisata, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 99,
100, 103, 104, 105, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 134
Excursionist, 7

F

fauna, 105
flora, 105
Foresterie, 35

G

Gateway, 23
Global positioning System, 89
guide, 28, 38, 67

H

Herberg, 34
Hinterland, 23
homestay, 27, 130
Hospiz, 35
hotel, 21, 22, 27, 33, 34, 36, 57

I

Indeks Nilai Penting (INP), 92, 93
industri pariwisata, 25, 26, 30, 31,
33, 36, 38, 40

J

jasa konsultan wisata, 38

K

keanekaragaman jenis, 93, 94, 124
konservasi, 60, 61, 63, 65, 66, 68,
83, 88, 121, 126, 127, 129
konvensi, 7, 13, 14, 28

L

landscape, 58, 65
layanan ekosistem, 70, 71, 72, 86

M

mangrove, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 105, 107, 109, 110, 111,
112, 113, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 134
manufacturing, 25
marga satwa, 17
Mean Sea Level, 96
Millennium Development
Goals/MDGs, 61
money changer, 38

N

new tourism, 2
Non Government Organization (NGO),
68

O

Observasi, 54
old tourism, 2
operator wisata, 67, 68
Opportunities, 118

P

pameran, 11, 42
Pariwisata, i, 5, 8, 9, 23, 26, 29, 30,
34, 43, 44, 58, 59, 60, 131, 132,
136
pariwisata berkelanjutan, 60, 61
partisipasi, 103, 112, 127
pasang surut, 96, 99
pekan raya, 11, 41, 42
Pension, 34
Perencanaan wisata, 49
Persepsi, 103, 113
Planning, 48, 132
pramuwisata, 16, 28, 38
Provisioning services, 71

R

rafting, 20
Regulating services, 71
rental car or motorcycle, 27
reptil, 94, 96, 119, 124
revitalisasi, 127, 129
Rhizophora mucronata, 90, 91, 92, 93,
119, 124
Rhizophora stylosa, 90, 91, 92, 93

S

sanatorium, 27
semai, 91, 93
Silviculture, 127, 129
Sonneratia alba, 90, 91, 92, 93
Sonneratia caseolaris, 90, 91, 92

souvenir, 27, 130
Strengths, 118
Supporting services, 71
sustainable tourism, 60

T

taman lindung, 17
Threats, 118, 122
tide gauge, 96
tour planner, 50
Tourist, 5, 7, 23
tourist destination area, 41
transek, 89, 94
travel credit, 28
true mangrove, 75

V

visitor, 7

W

Weaknesses, 118, 120
Wisata Bahari, 16, 17, 134
Wisata Berburu, 18, 19
Wisata Budaya, 9

Wisata Bulan Madu, 21
Wisata Cagar Alam, 17, 18
wisata industri, 12
Wisata Kesehatan, 10
Wisata Komersial, 11
Wisata Konvensi, 14
Wisata Olahraga, 10, 11
Wisata Pertanian, 15, 16
Wisata petualangan, 20
Wisata Pilgrim, 19, 20
Wisata Politik, 13, 14
Wisata Sosial, 15
wisatawan, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 87,
88, 113, 115, 116, 121, 126, 130

X

Xylocarpus granatum, 90, 91, 92

Z

zonasi, 66

BIOGRAFI PENULIS



Abdul Malik adalah Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang ilmu Geografi. Lahir di Makassar 11 Oktober 1977. Menyelesaikan program Sarjana dari Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanauddin (UNHAS) Makassar tahun 2001. Magister Sains dari Program Studi Lingkungan Hidup dengan konsentrasi Pengelolaan Lingkungan Laut Dangkal dan Pantai UNHAS Makassar tahun 2005. Gelar Ph.D. diperoleh dari Department of Geosciences and Natural Resource Management, Section Geography, University of Copenhagen, Denmark tahun 2016. Aktif sebagai dosen tetap dan peneliti pada Jurusan Geografi FMIPA Universitas Negeri Makassar (UNM) sejak 2006 – sekarang dan mengajar di Program Magister Pendidikan Geografi Pascasarjana UNM sejak 2016-Sekarang. Saat ini menjabat Kepala Unit Workshop Geospasial Jurusan Geografi. Dalam lima tahun terakhir penulis aktif melakukan penelitian dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, lingkungan, remote sensing untuk ekosistem pesisir, biodiversity, layanan dan nilai ekonomi ekosistem pesisir, dan ekowisata. Beberapa artikel ilmiah yang ditulis telah terpublikasi di jurnal internasional terindeks dan bereputasi (Q1, Q2 dan Q3) pada publisher Springer, Elsevier, MDPI dan TSHE. Penulis juga menjadi Peer-reviewer dan editorial board untuk beberapa jurnal nasional maupun internasional sejak tahun 2016 hingga sekarang.



Abd. Rahim adalah Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian. Lahir di Makassar 12 Desember 1973. Menyelesaikan Program Diploma Agribisnis FP-UNHAS Makassar (1997). Gelar Sarjana Pertanian (S.P.) dari Jurusan Sosek Pertanian FP-UNHAS Makassar (2000). Magister Sains (M.Si.) Program Studi Magister Manajemen Agribisnis FP-UGM Yogyakarta (2003).

Doktor (Dr.) Program Studi Ekonomika Pertanian FP-UGM (2010) dengan predikat "Cumlaude". Aktif sebagai dosen tetap dan peneliti pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi FE-UNM Makassar (2005-2009), selanjutnya berdasarkan kompetensinya pindah ke Program Studi Ekonomi Pembangunan konsentrasi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis FE-UNM Makassar (2010-sekarang). Dosen Luar Biasa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UNM (2011-Sekarang). Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FE-UNM Makassar (2012-2016) dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan FE UNM (2017-2021). Selain mengajar penulis aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi pertanian, ekonomi rumah tangga nelayan, ekonometrika dan ekonomi lingkungan. Beberapa Buku Ajar dan Referensi ilmiah ber-ISBN serta artikel ilmiah nasional dan internasional telah di terbitkan sejak tahun 2005 hingga saat ini, dan menjadi Peer reviewer pada beberapa jurnal nasional dan internasional.



Uca Sideng, lahir di Buntu Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 4 April 1971. Menyelesaikan studi di Jurusan Geografi Fisik Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada tahun 1996 dengan gelar Sarjana Sains (S.Si.). Pada tahun 1998 sampai sekarang bekerja sebagai dosen di Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar. Tahun 1999 melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dan mendapat gelar Magister Pertanian (M.P.) pada tahun 2002. Tahun 2009 melanjutkan studi doktor di Department Geografi Universitas Kebangsaan Malaysia dan mendapat gelar Ph.D. pada tahun 2014. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Geografi FMIPA Universitas Negeri Makassar. Penulis juga mengajar di Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Geografi. Di samping mengajar, penulis juga melakukan penelitian bidang lingkungan, pertanian dan mitigasi, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.